



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



*Aksi di venue
dan inspektasi
2021*



LKJIP

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
LKKS
KABUPATEN DHARMASRAYA
Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Pujung Telp./Fax 07541 451485

LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA
(LK3)
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN DHARMASRAYA
Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Pujung Telp./Fax 07541 451485

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
(SOSP3APPKB)
Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Pujung

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-nya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 – 2021, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya Peduli, Sejahtera dan Berbudaya”**.

Sebagai program yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat

khususnya bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pulau Punjung,

2022

↓
KEPALA DINAS,



BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19820521 200012 1 02

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2021, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya Peduli, Sejahtera dan Berbudaya”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya melaksanakan 10 (Sepuluh) program dengan 16 (Enam Belas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) subkegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.9.226.434.950,-** (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 5 Sasaran Strategis, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021	I-1
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pangkat/ Golongan di DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021	I-4
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan di DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021	I-4
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DINSOSP3APPKB Tahun 2016-2021	II-9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan DINSOSP3APPKB Tahun 2021	II-10
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kesatu	III-18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua	III-36
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketiga	III-45
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat	III-51
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kelima	III-57
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Tak Langsung	III-64
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Langsung	III-65
Tabel 3.8	PRESTASI YANG DITERIMA DINSOSP3APPKB TAHUN 2021	III-67

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) terbentuk dari perpecahan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Permbudayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPML2NPPKB) dengan SKPD Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SosNakerTrans), yang mana BPML2MNPPKB pecah menjadi BPML2N dan PPKB yang saat ini diganti menjadi DPMD dan PPPAKB kemudian SosNakerTrans pun juga pecah menjadi Sos dan NakerTrans.

Pada tahun 2016 yang lalu, yang diperkuat dengan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2016, PPPAKB bergabung dengan Sos menjadi SOSP3APPKB.

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINSOSP3APPKB

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.

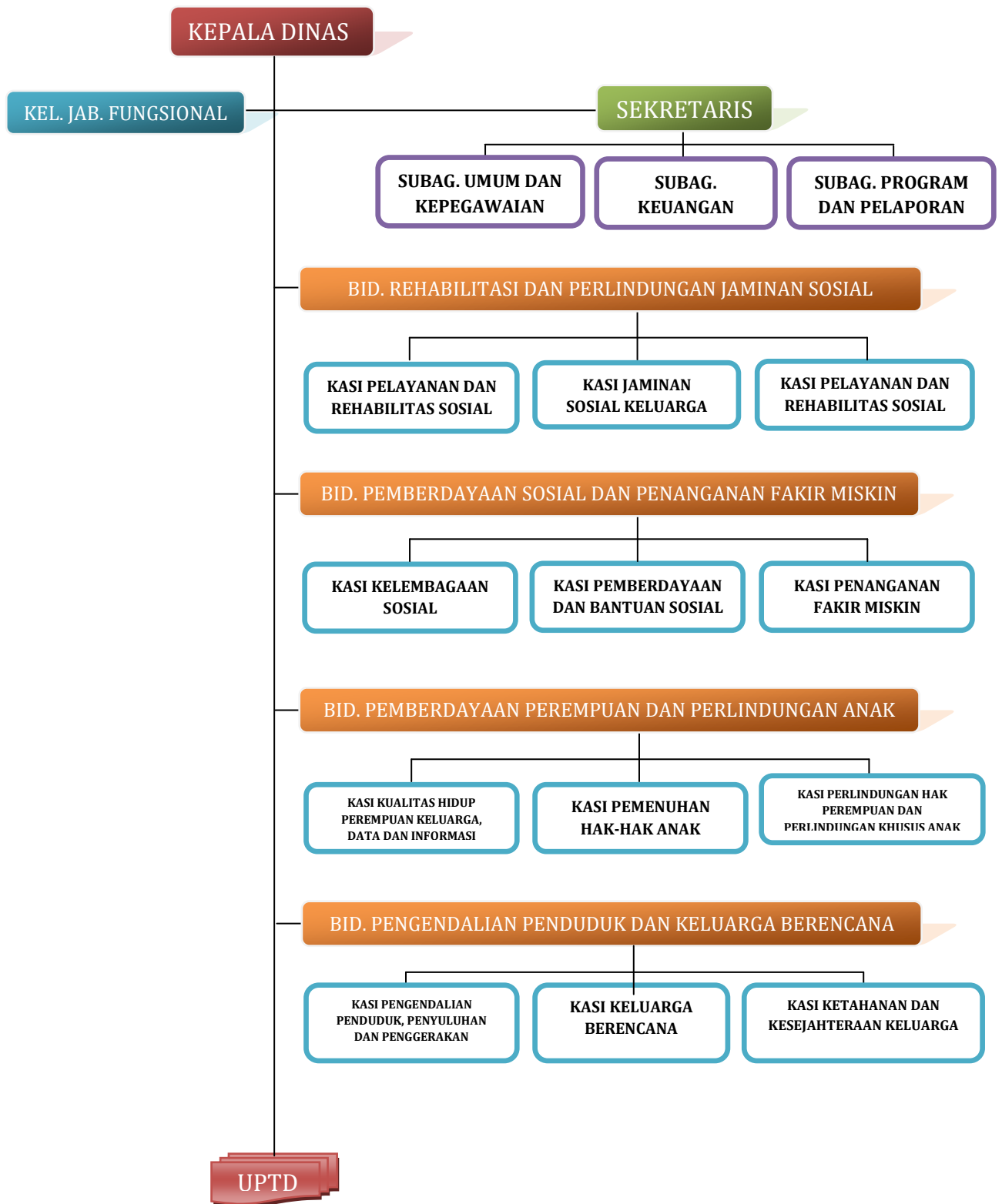
DINSOSP3APPKB mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Susunan Organisasi DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

Adapun uraian tugas dan fungsi berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Daerah di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 Data-data Organisasi

🚦 Pegawai

Susunan Kepegawaian DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikan, golongan kepegawaian, dan eselon.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SMA/ Sederajat	1	0	9	4	14
2	Diploma I	0	2	0	1	3
3	Diploma III	0	0	0	0	0
4	Sarjana	6	12	10	15	43
	Jumlah	7	14	19	20	60

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di DINSOSP3APPKB terdapat sebanyak 60 Orang, dimana terbagi atas PNS sebanyak 21 orang dan Non PNS (THL, Honor Daerah) sebanyak 39 Orang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai DINSOSP3APPKB adalah Sarjana.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pangkat/ Golongan di DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	2	3	5
2	Golongan III	4	10	14
3	Golongan II	1	1	2
	Jumlah	7	14	21

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Pegawai berdasarkan tingkat pangkat/golongan yang ada di DINSOSP3APPKB terdapat sebanyak 21 orang, dimana laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 14 orang dengan pangkat/golongannya yaitu Gol. IV ada 5 orang, Gol.III 14 orang dan Gol.II ada 2 orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan di DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	2	6	8
4	Non Eselon/Staf	4	3	7
	Jumlah	7	14	21

Sumber data: Subsubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Pegawai berdasarkan tingkat jabatannya di DINSOSP3APPKB terdapat sebanyak 21 orang, dimana laki-laki sebanyak 7 orang termasuk staf dan perempuan sebanyak 14 orang juga termasuk staf. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang mempunyai jabatan Ess.II ada 1 orang, Ess III ada 5 orang, Ess IV ada 8 orang, dan Non Ess/staf ada 7 orang.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) adalah dokumen perencanaan DINSOSP3APPKB untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja

perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan terpilihnya Bapak Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE sebagai Bupati Dharmasraya, dan Bapak Drs. Daril Panin Datuak Labuan sebagai Wakil Bupati maka perlu adanya penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi kepala dan wakil kepala daerah terpilih dengan tugas pokok dan fungsi dari DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, maka DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya harus menyelaraskan Rancangan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi yang telah ditetapkan.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “**Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya**”. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya adalah “**Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya Peduli, Sejahtera dan Berbudaya**”. Yang berarti:

- Peduli** : Sikap keprihatinan serta tanggap dengan keadaan dan kondisi masyarakat
- Sejahtera** : Kondisi masyarakat yang makmur, sehat dan damai
- Berbudaya** : Kondisi masyarakat memiliki nilai dan tradisi multikultural yang berkarya dan berinovasi untuk kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Dalam rangka pencapaian visi di atas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk sumber kemajuan ekonomi ketersediaan sarana pelayanan dasar daerah secara merata.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Agama, adat dan identitas budaya menjadi landasan pembangunan Dharmasraya.

C. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DINSOSP3APPKB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Sosial

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, disamping itu masyarakat juga masih belum mau untuk melaporkan kasus-kasus yang belum terdampingi;
- b. Masih banyaknya petugas yang kurang paham dengan tugas yang akan mereka kerjakan sebagai petugas verivali karena petugas verivali yang berganti-ganti;
- c. Belum terakomodirnya anggaran untuk petugas verivali setiap bulannya;
- d. Masih belum lengkapnya mesin EDC yang disediakan di E-Warong oleh pihak Himbara (Bank Mandiri) karena ada mesin EDC yang rusak dan belum diganti;
- e. Banyak warga masyarakat yang masih mengeluh untuk bisa dimasukkan sebagai penerima program PKH;
- f. Masih banyaknya warga yang sebenarnya berhak masuk PKH namun penentuan quota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemda tidak berhak untuk menambah tapi berhak untuk mengurangi;
- g. Belum memadainya sarana prasarana untuk proses evakuasi korban bencana;
- h. Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana;
- i. Belum terbentuknya Tim Reaksi Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) utamanya pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih perlu ditingkatkan;
- b. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif
- c. Terdapatnya perbedaan upah kerja laki-laki dengan perempuan terutama disektor pertanian;
- d. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
- e. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
- f. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan anak dan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- g. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak;
- h. Rendahnya pelaporan tentang kasus KDRT, karena masyarakat masih menganggap masalah KDRT merupakan sesuatu hal yang tabu untuk dilaporkan.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Minimnya obat set effect untuk pemasangan alat kontrasepsi yang tidak disediakan oleh BKKBN perwakilan Sumatera Barat,;
- b. masih kurangnya ratio tenaga penyuluh KB di lini lapangan;
- c. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi;
- e. Akses masyarakat miskin terhadap alat kontrasepsi masih rendah;
- f. Untuk pelayanan KB MOW dan MOP belum bisa dilaksanakan di Dharmasraya karena kurangnya sarana prasarana yang ada dikabupaten Dharmasraya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I** : **Pendahuluan**, menyajikan penjelasan tugas, fungsi dan struktur organisasi DINSOSP3APPKB, data-data organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II** : **Perencanaan Kinerja**, menguraikan Rencana Strategis, Tujuan dan sasaran serta Perjanjian Kinerja tahun 2021;
- Bab III** : **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan perhitungan kerja dan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis serta realisasi anggaran selama tahun 2021;
- Bab IV** : **Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. KETERKAITAN DENGAN VISI DAN MISI BUPATI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) adalah dokumen perencanaan DINSOSP3APPKB untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan terpilihnya Bapak Sutan Riska, SE sebagai Bupati Dharmasraya, dan Bapak Drs. Dasril Panin Datuak Labuan sebagai Wakil Bupati maka perlu adanya penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi kepala dan wakil kepala daerah terpilih dengan tugas pokok dan fungsi dari DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, maka DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya harus menyelaraskan Rancangan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi yang telah ditetapkan.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”**. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya adalah **“Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya Peduli, Sejahtera dan Berbudaya”**. Yang berarti:

- Peduli** : Sikap keprihatinan serta tanggap dengan keadaan dan kondisi masyarakat
- Sejahtera** : Kondisi masyarakat yang makmur, sehat dan damai
- Berbudaya** : Kondisi masyarakat memiliki nilai dan tradisi multikultural yang berkarya dan berinovasi untuk kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Dalam rangka pencapaian visi di atas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk sumber kemajuan ekonomi

ketersediaan sarana pelayanan dasar daerah secara merata.

3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Agama, adat dan identitas budaya menjadi landasan pembangunan Dharmasraya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke ke 1 “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat” dan misi ke 3 “Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat” serta misi ke 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah”.

Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DINSOSP3APPKB Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.1 Terlampir:

B. PERJANJIAN KINERJA

Adapun perjanjian kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan DINSOSP3APPKB Tahun 2021

1. Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat miskin	5,50%
		Persentase PMKS yang tertangani	95,00%
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	91,17%
		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100%
		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Pratama
3	Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan	Rasio KDRT	0,01%
		Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100%
		Rasio anak korban kekerasan yang tertangani	100%
4	Meningkatnya keterlibatan PUS dalam KB	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	84,68%
		Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need)	8,09%
5	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	100%
		Persentase kelompok tribina yang aktif	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Hasil penilaian AKIP DINSOSP3APPKB oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.879.936.000,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 90.832.200,-	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 63.365.550,-	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 93.417.800,-	APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 540.967.000,-	APBD
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 708.215.200,-	APBD
7	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 75.286.550,-	APBD

8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 67.072.400,-	APBD
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.631.989.000,-	APBD & DAK (APBN)
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 75.353.250,-	APBD
Jumlah		Rp 9.226.434.950,-	

2. Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DINSOSP3APPKB	100%
		Persentase peningkatan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DINSOSP3APPKB	100%
		Persentase pencapaian program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DINSOSP3APPKB	100%

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola manajemen administrasi umum dan kepegawaian	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya tata kelola administrasi keuangan	Persentase penatausahaan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%
		Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penangana Fakir Miskin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase Keluarga miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan fungsi sosialnya di masyarakat	75%
2	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase masyarakat di daerah terpencil/KAT yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	75%
3	Meningkatnya partisipasi PSKS di masyarakat	Persentase PSKS (Orsos, KT, Tagana, PSM, WKBSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pendamping) yang terampil dan Profesional	80%

a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersalurnya Bantuan Sosial Pangan	Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Rastra dan BPNT	8.609 KPM
2	Tersalurnya Bantuan Jaminan Kesehatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan JKN PBI Daerah	24.171 Jiwa

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyediakan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan organisasi perempuan dalam pembangunan	100%
3	Meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kec, kenagarian, TESA, PISA)	100%
4	Meningkatnya akses masyarakat tentang informasi KDRT	Jumlah lembaga penanganan kasus KDRT di masyarakat	3 Lembaga
5	Meningkatnya kualitas penanganan perempuan korban kekerasan	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100%
6	Meningkatnya kualitas penanganan anak korban kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100%

5. Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase anak terlantar dan anak yang berhadapan hukum yg terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	40%
		Persentase penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	100%
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	100%
2	Mengoptimalkan penanganan darurat bencana yang responsif dan dukungan logistik	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
3	Mengoptimalkan penanganan evakuasi dengan peralatan untuk penanggulangan bencana yang lebih baik	Mengoptimalkan penanganan evakuasi dengan peralatan untuk penanggulangan bencana yang lebih baik	100%

a. Kepala Seksi Pelayanan Dan Rehabilitas sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah anak terlantar dan anak berhadapan hukum yang terbantu	Jumlah anak terlantar yang terampil dan anak ABH yang terdampingi	9 anak Terlantar, 12 ABH
2	Terpenuhinya jaminan hidup penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Program Atensi Penyandang Disabilitas Berat	36 orang
3	Terpenuhinya jaminan hidup penyandang Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Program Atensi Lanjut Usia Terlantar	65 orang

b. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat korban bencana	Jumlah Masyarakat yang dapat ditangani terhadap dampak bencana	639 KK/ 5.663 jiwa (Covid & dampak Covid) 1.908 jiwa (Alam) 183 jiwa (sosial)
2	Terwujudnya proses evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan bencana	3 Unit

c. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersalurnya Bantuan Jaminan Kesehatan	Jumlah KPM yang terfasilitasi mendapatkan bantuan PKH	5.208 KPM

6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kepesertaan KB Aktif di Masyarakat	Jumlah Peserta Akseptor KB Aktif	36.894 PUS
2	Meningkatnya pengetahuan, informasi serta kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menggunakan alat kontrasepsi	Jumlah orang sosialisasi alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	44.572Orang
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR Mandiri	Persentase anggota UPPKS KB aktif	95%
4	Meningkatnya pengembangan bahan informasi, tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase BKB, BKR, BKL yang aktif	100%

a. Kepala Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi	Jumlah kelompok UPPKS yang diberi modal	6 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase kader Tribina (BKB, BKR, BKL) yang aktif	100%
		Jumlah peserta pembinaan/ sosialisasi Tribina (BKB, BKR, BKL)	2.450 Orang

b. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan KB	Persentase pelayanan oleh Kader KB (PLKB, PPKBD/ Sub. PPKBD)	100%
		Jumlah kampung KB di Kabupaten	28 Kampung KB
		Jumlah Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam Tahun 2021.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan yang secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

A. Formula Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- ◆ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Indikator Kinerja} \\ = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \end{array}$$

- ◆ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Indikator Kinerja} \\ = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\% \end{array}$$

Atau :

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Indikator Kinerja} \\ = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% \end{array}$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

- > 85 : sangat berhasil
- $70 < X \leq 85$: berhasil
- $55 < X \leq 70$: cukup berhasil
- < 55 : tidak berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

B. Hasil Pengukuran Dan Analisis Pencapaian Kinerja Per Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Adapun pelaksanaannya DINSOSP3APKB Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

MENGURANGI PERMASALAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT

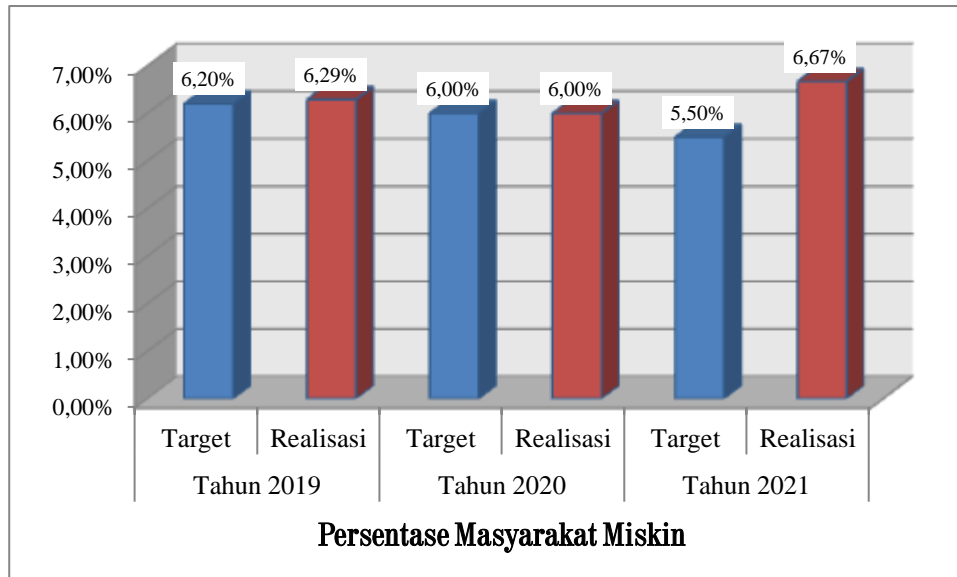
Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “Menurunnya tingkat Kemiskinan”. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kesatu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi Nasional 2020
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase masyarakat miskin	%	6,20	6,29	101,45	6	6	100	5,5	6,67	121	Sangat Berhasil	5,5	9,78
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	90	90	100	75	75	100	95	96	101	Sangat Berhasil	95	
	Rata-rata data kelompok tertimbang										111	Sangat Berhasil		
	Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)											92,5		

Capaian strategis 1 mendapatkan rata-rata kelompok tertimbang 111 dengan kategori **sangat berhasil** dan nilai mean **92,5**, keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu:

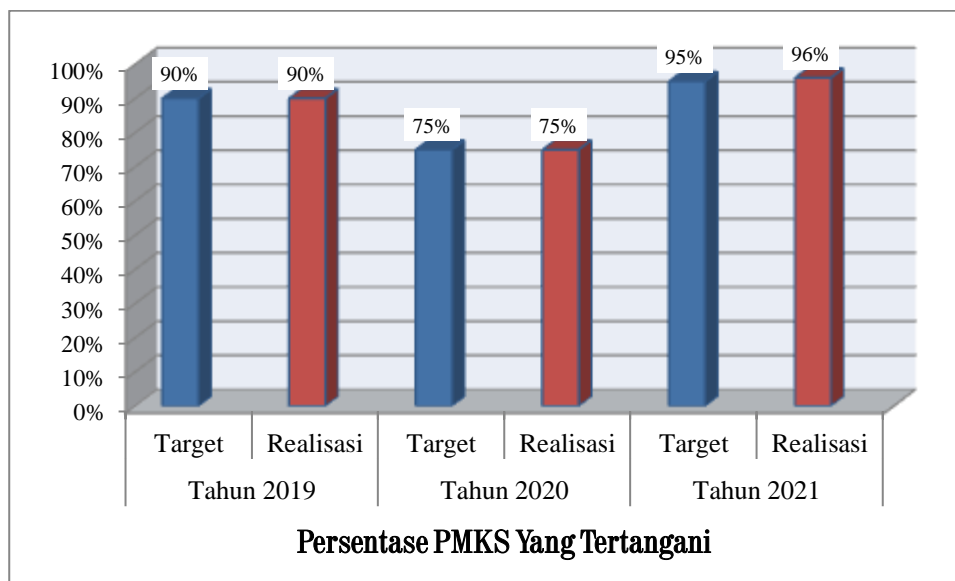
1. Persentase masyarakat miskin



Grafik 3.1 Persentase masyarakat miskin

Angka kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 6,67% dari jumlah penduduk miskin yang terdata dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 132.519 jiwa. Sementara angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 6,23 % dari jumlah penduduk miskin sebanyak 228.591 Jiwa (Sumber Data BPS Kab. Dharmasraya). Sehubungan dengan dampak dari pandemi covid-19 ternyata sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat seperti pemutusan hubungan kerja dan penutupan usaha di sector UMKM akibat perekonomian yang tidak menentu. Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,67% ini merupakan kenaikan yg signifikan sejak tahun 2018 yang lalu (Sumber dari BPS Kabupaten Dharmasraya), angka kemiskinan ini masih rendah dibandingkan angka nasional (10,14%). Hal ini didukung dengan adanya program pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial RI melalui bantuan sosial tahun 2021 seperti Bantuan Sembako untuk 25.633 KPM yang diberikan kepada masyarakat melalui agen E-Warong dengan nilai voucher sebesar Rp. 200.000 yang ditukarkan dengan beras dan telur ditambah bahan pangan yang mengandung karbohidrat protein hewani, protein nabati dan vitamin mineral dengan menggunakan kartu KKS. dengan kriteria Keluarga Penerima Manfaat adalah dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat miskin juga diberi jaminan kesehatan baik yang bersumber dari Pusat (Penerima Bantuan Iuran Pusat), maupun bersumber dari Pemerintah Daerah (Penerima Bantuan Iuran Daerah) yang berjumlah total 24.171 jiwa. Termasuk juga bantuan-bantuan dari dinas instansi terkait. Selain itu, juga ada dukungan dari BAZNAS.

2. Persentase PMKS yang tertangani



Grafik 3.2 Persentase PPKS yang Tertangani

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari target 95% terealisasi 96%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari seluruh PPKS ditargetkan sebanyak 132.706 orang dari 138.235 orang sudah ditangani pada tahun 2021. Dalam pencapaian target ini kegiatan yang dilakukan berupa:

a. Verivali Data Fakir miskin dan PPKS lainnya

Bentuk kegiatannya adalah:

- **Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin.**

Kegiatan ini berupa verifikasi dan validasi data DTKS Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sebanyak 132.519 Jiwa. Kegiatan verivali ini sangat penting karena Kab/Kota diberikan kesempatan melakukan perbaikan data empat kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Verifikasi dan validasi dilaksanakan per-triwulan oleh Kepala Jorong selaku petugas pendata dan Kasi Kesra Nagari selaku Operator aplikasi SIKS-NG offline dan online di Nagari. Kegiatan ini dimulai dengan Sosialisasi kepada seluruh Jorong, Nagari, dan Kecamatan tentang pentingnya pelaksanaan verivali ini. Dilanjutkan dengan Bimtek Operator Nagari per-Triwulan, sekaligus penyerahan data yang akan di verivali. Dilanjutkan dengan kegiatan *roadshow* ke Nagari-nagari untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, yang salah satu kegiatannya adalah verivali DTKS. Verivali dilaksanakan oleh kepala Jorong dan boleh mengusulkan data baru jika ditemukan masyarakat miskin yang belum ada dalam data DTKS tersebut.

Verivali telah dilaksanakan walaupun tidak semua jorong menyelesaikannya, namun kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan telah melakukan perbaikan data yang disampaikan ke pusat pada bulan Oktober 2021 melalui aplikasi SIKS-NG online, sebanyak 132.519 jiwa yang sudah di verivali dari 132.519 jiwa yang harus diverivali, dengan capaian 100% sbb:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{jumlah jiwa yang sudah di verivali}}{\text{Jumlah jiwa yang ada di DTKS}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{132.706 \text{ Jiwa}}{138.235 \text{ Jiwa}} \times 100\% \\ &= 96\% \end{aligned}$$

Anggaran Kegiatan Pendataan Fakir Miskin dan PPKS Lainnya bersumber dari Dana APBD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp. 93,417,800- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 93,379,300 (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah tiga dua ratus lima puluh Ribu Rupiah) atau 99,9%.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan permasalahan, yaitu :

- ✓ Masih banyaknya petugas yang kurang paham dengan tugas yang akan mereka kerjakan baik sebagai pendata maupun operator.
- ✓ Belum terakomodirnya anggaran untuk petugas pendata

b. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sembako

Bantuan sosial sembako ini, diberikan kepada masyarakat kurang mampu, yang telah ditetapkan Kementerian Sosial RI sasaran atau penerima manfaatnya, Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program sembako. Program sembako merupakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) dalam hal makanan. Penyaluran dana program sembako dilakukan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa kartu keluarga sejahtera (KKS).

Dana bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli komoditas bahan pangan yang telah ditentukan untuk program sembako di Elektronik Warung Gotong Royong (E-warong) dan tidak dapat diambil tunai. Bila komoditas yang dapat dibelanjakan sebelumnya beras dan telur, pada program sembako ditambahkan dengan komoditas bahan pangan yang mengandung karbohidrat (jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian lainnya), protein hewani (daging ayam, daging, ikan), protein nabati (tahu, tempe dan kacang-kacangan) dan vitamin mineral (sayuran dan buah-buahan).

E-warong yang telah ditunjuk di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 57 E-warong yang tersebar di 52 Nagari. Setiap bulannya KPM akan mengambil bahan pangan sesuai dengan ketentuan di E-warong dengan syarat membawa kartu KKS, PIN dan KTP dan fotocopy kartu vaksin.

Jumlah KPM di Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2021 sebagai berikut:

NO	Jenis bantuan	JUMLAH
1	BPNT Reguler	8.632
2	BPNT PPKM	14.501
3	BPNT Perluasan	2.500
	TOTAL	25.633

Data penerima program sembako ini mengalami perubahan karena adanya data perluasan program sembako dan tambahan karena terjadinya pandemic Covid-19 yang mengoyangkan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Data penerima ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI di Rektorat Jendral Fakir Miskin.

Anggaran pendukung bersumber APBD Kabupaen Dharmasraya tergabung kedalam Anggaran Kegiatan Pendataan Fakir Miskin dan PPKS Lainnya yang dijelaskan diatas



c. Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan kelembagaan konsultasi kesejahteraan sosial (LKKS) dan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh ibu Dewi Sutan Riska yang mana kegiatannya bertujuan untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat Dharmasraya terutama masyarakat kurang mampu dan memberikan dukungan pemberdayaan kepada keluarga tertinggal diseluruh nagari dan jorong di Kabupaten Dharmasraya. Bentuk kegiatan yang sudah terlaksana adalah pembinaan terhadap posdaya yang sudah terbentuk dan mengaktifkan posdaya yang sudah terbentuk tapi tidak aktif, disamping itu juga ada kegiatan fasilitasi pembagian hewan qurban kepada seluruh nagari untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemda kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2021 ada 25 sapi qurban dan 3 ekor kambing yang dibagikan kepada masyarakat. LKKS Kabupaten Dharmasraya juga mendapat binaan dari LKKS Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan pelatihan dan workshop baik yang dilakukan di kabupaten maupun di provinsi.

Selain LKKS, juga ada kegiatan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mana kegiatan ini merupakan pendampingan terhadap keluarga yang bermasalah seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan.

Pendampingan dimulai dari keluarga sampai ke badan hukum dan persidangan, dilengkapi dengan bantuan/dampingan psikologi. Tahun 2021 ada 12 kasus yang didampingi.

lengkap dengan bantuan/dampingan psikologi oleh psikolognya. Tahun 2021 ada 12 kasus yang didampingi dari 12 kasus yang ada, dengan capaian, sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah kasus yang didampingi}}{\text{Jumlah kasus}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{12 \text{ kasus}}{12 \text{ kasus}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Kegiatan ini bersumber dari APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30. 663,800,- (Tiga puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 30. 490,550,- (Tiga puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 99,4%.

Permasalahan yang ditemukan terkait kegiatan Kelembagaan ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, disamping itu masyarakat juga masih merasa sungkan untuk melaporkan kasus-kasus yang belum terdampingi. Solusi yang sudah dilaksanakan adalah dengan memberikan pembinaan secara intern kepada masyarakat dan pendekatan kepada pemuka-pemuka nagari serta memberikan sosialisasi kepada semua pihak tentang keberadaan LK3 dan LKKS.



d. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemberian pengganti transportasi bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat Kecamatan tahun 2021 diberikan penggantian sebanyak 26 kali perjalanan dengan nominal Rp. 100.000,-/org/kali kegiatan dengan total Rp 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Dengan penggantian transportasi diharapkan dapat membantu petugas sosial dilapangan untuk melaksanakan tugas sosialnya dalam

penanggulangan permasalahan-permasalahan Kesejahteraan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada, serta dalam membina Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah kerjanya masing-masing. Disamping kegiatan diatas juga dilaksanakan pembinaan terhadap pendamping dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Kabupaten Dharmasraya yaitu Suku Anak Dalam (SAD) yang berjumlah 19 KK, 77 Jiwa dan 2 rombongan di 2 titik lokasi yaitu nagari Banai kecamatan Sembilan Koto dan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar. Dari hasil pembinaan tersebut pada tahun ini sudah diterbitkan status kependudukan untuk SAD sebagai warga Kabupaten Dharmasraya yang sah, yang diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk tahun ini Suku Anak Dalam yang berada di Sembilan Koto, sudah menerima Bantuan sosial BPNT sembako.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 60.168.400,- (Enam puluh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp. 60.131.250,- (enam puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 99,9%.



e. **Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar**

Seseorang dikatakan Lanjut Usia apabila umurnya sudah mencapai ≥ 60 tahun. Penduduk Kab. Dharmasraya yang berumur ≥ 60 Tahun berjumlah 16.479 jiwa. Sementara yang hidup kurang mampu berdasarkan data BDT ada 6.600 jiwa baik lansia terlantar, tidak potensial dan yang masih potensial. Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Baznas Kab. Dharmasraya melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar berusaha memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permensos Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran lansia yang mendapatkan bantuan adalah memenuhi kriteria penerima yakni: Usia ≥ 60 tahun, terlantar/kurang mampu.

Bentuk-bentuk bantuan : permakanan, alat bantu, reunifikasi, rujukan dan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial baik kepada yang bersangkutan, keluarga, keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Adapun jenis bantuan yang telah diterima oleh Lansia adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1	Program Atensi Lanjut Usia	65	121.956.000,-	Pusat
2	Bantuan Lansia dan Jompo Kurang Mampu	62	74.400.000,-	Baznas
3	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	46	50.032.000,- 33.374.000,-	APBD Pusat
	Total	173	279.762.000,-	

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah bantuan yang diterima Lansia}}{\text{Jumlah bantuan Lansia seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{173}{173} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$



Lansia Penerima Bansos



Lansia Penerima Paket Permakanaan

(Dokumentasi Dinas SOSP3APPKB, 2021)

f. Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar

Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial dasar sebanyak 31 orang. Orang Dengan Kedisabilitasannya tersebut memang memerlukan perhatian yang berlebihan, karena kondisinya terlantar/kurang mampu dan merupakan disabilitas berat. Melihat kondisi disabilitas fisik dan mental (penderita cacat ganda) mereka memerlukan perhatian lebih khusus lagi karena aktifitasnya memerlukan bantuan orang lain. Target kinerja 100% terealisasi 100% yakni jumlah disabilitas berat yang menerima bantuan dibagi dengan jumlah disabilitas berat keseluruhan.

Adapun dari jumlah Penyandang Disabilitas tersebut dibantu melalui Dana Pemerintah Daerah berupa bantuan permakanaan, alat bantu, rujukan, reunifikasi keluarga dan fasilitasi bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial baik kepada yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Adapun jenis bantuan yang telah diterima oleh Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1	Program Atensi Penyandang Disabilitas	21	26.269.000,-	Pusat
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	15	23.500.000,-	ABPD II
	Total	36	49.769.000,-	

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan}}{\text{Penyandang disabilitas seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{36}{36} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$



Penyandang disabilitas penerima permakanan dan alat bantu

(Dokumentasi : Dinas SOSP3APPKB, 2021)

g. Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar

Anak terlantar yang mendapatkan bantuan 38 orang dengan kategori anak terlantar yang benar-benar ditinggalkan orang tua dan keluarganya, diasuh atau dipelihara oleh keluarganya tetapi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jenis-jenis pengasuhan yang dilaksanakan untuk membantu anak terlantar ini adalah diasuh oleh keluarga besarnya, masyarakat sekitar dan dipanti-panti baik di dalam maupun diluar Kab. Dharmasraya baik milik swasta maupun pemerintah. Bantuan yang diberikan berupa permakanan, rujukan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Target kinerja 100% terealisasi 100% yakni jumlah anak terlantar yang menerima bantuan dibagi dengan jumlah anak terlantar keseluruhan.

Adapun tempat-tempat rujukan anak terlantar :

- PSAA Harapan Padang Panjang : 12 orang
- PSAA Tri Murni Padang Panjang : 5 orang
- PSAABR Budi Utama Lubuk Alung : 15 orang
- PSAA Fastabiqul Khairat Koto Baru Dharmasraya : 1 orang
- PSAA Ikhwanul Shafa Lasi Mudo Kab. Agam : 2 orang

Adapun jenis bantuan yang telah diterima oleh Anak Terlantar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1	Bantuan Transpotasi dan seragam sekolah	2	3.000.000,-	Baznas
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	36	12.422.000,-	ABPD II
	Total	38	15.422.000,-	

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah bantuan yang diterima Anak Terlantar}}{\text{Jumlah bantuan Anak Terlantar seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{38}{38} \times 100\%$$

$$= 100\%$$



Anak terlantar yang memperoleh bantuan permakanan dan pelayanan rujukan



(Dokumentasi Dinas SOSP3APPKB Tahun 2021)

h. Bantuan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Tuna Sosial

Tuna Sosial yang mendapatkan bantuan sebanyak 21 orang dengan kategori : orang yang hidup menggelandang dan meminta-minta di tempat-tempat umum dan sepanjang jalan serta orang terlantar di perjalanan yang kehabisan bekal atau karena disebabkan kehilangan harta dan bendanya. Bantuan yang diberikan berupa permakanan, rujukan, reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Target kinerja 100% terealisasi 100% yakni jumlah tuna sosial yang menerima bantuan dibagi dengan jumlah tuna sosial keseluruhan.

Adapun jenis bantuan yang telah diterima oleh tuna sosial adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1	Bantuan Transpotasi dan makan	10	4.000.000,-	Baznas
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Tuna Sosial	11	5.500.000,-	ABPD II
	Total	21	9.500.000,-	

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah bantuan yang diterima Tuna Sosial}}{\text{Jumlah bantuan Tuna Sosial seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{21}{21} \times 100\%$$

$$= 100\%$$



Tuna Sosial menerima bantuan permakanan dan fasilitasi reunifikasi keluarga

i. Bantuan Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial berupa bantuan uang tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tingkat kemiskinan 15% ke bawah. Pada tahun awal tahun 2021 penerima program PKH di Kab. Dharmasraya berjumlah 4.424 dan pada akhir tahun 2021 berjumlah 5.182 KPM. Kenaikan KPM ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah KPM PKH dari Pusat. Adapun kenaikan jumlah KPM per adalah sebagai berikut :

Tahap	KPM	Jumlah Transaksi	Nominal Transaksi	Jumlah Tidak Transaksi	Nominal Tidak Transaksi
I	4.424	4.421	3.190.425.000,-	3	1.425.000,-
II	5.208	5.186	3.813.400.000,-	22	14.275.000,-
III	5.172	5.141	3.428.475.000,-	31	21.550.000,-
IV	5.128	5.064	3.675.950.000,-	118	85.875.000,-
TOTAL			14.108.250.000,-	174	123.125.000,-

Dari total KPM selama tahun anggaran 2021 yang tidak mencairkan dana PKH ada sebanyak 174 KPM yang tidak dibayarkan, hal ini disebabkan :

1. KPM yang ganti pengurus
2. Non Eligible (sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima PKH)
3. Saldo 0
4. Kartu KKS rusak
5. Menabung
6. PKH irisan sembako
7. KKS terblokir
8. Kartu KKS belum terdistribusi

Berjalannya waktu data tersebut harus diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan kriteria penerima Program PKH.

Realisasi anggaran Program PKH mencapai 99,37%. Sedangkan realisasi KPM yang mencairkan bantuan 99,13%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah KPM yang sudah menerima bantuan dari Program PKH}}{\text{Jumlah KPM penerima Program PKH}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{19.812}{19.986} \times 100\%$$

$$= 99,13 \%$$



Disamping memberikan bantuan tunai, KPM PKH juga mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang Peningkatan Pendapatan Keluarga, belajar Kelompok Usaha Bersama.

(Dokumentasi : Dinas SOSP3APPKB, 2021)

j. Bantuan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum

Program ini merupakan program pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terhadap anak yang berusia 1 s/d 18 tahun terhadap kasus : pencurian, penelantaran, persetubuhan, pelecehan seksual dan peretasan akun baik anak sebagai palaku, korban maupun saksi. Wujud kegiatan pendampingan adalah : pendampingan saat mem-BAP di Polsek/polres, mengembalikan keberfungsian anak di masyarakat, meminimalisir tingkat stress anak dalam menghadapi masalah, proses persidangan dan tindak lanjut/terminasi. Selama 2021 telah melakukan pendampingan sebanyak 12 (dua belas) kasus dengan jumlah anak yang didampingi.

Target pendampingan 12 (dua belas) anak ABH dengan kasus sebanyak 12 (dua) kasus.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah kasus ABH yang didampingi}}{\text{Jumlah pendampingan kasus ABH}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = \frac{12}{12} \times 100\%$$
$$= 100 \%$$



Kasus Penelantaran & Pencurian



Kasus Pelecehan seksual

(Dokumentasi Dinas SOSP3APPKB 2021)

k. PSKS (Potensi Sumber-Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terampil dan Profesional

PSKS (Potensi Sumber-Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah tenaga relawan yang bekerja untuk membantu dan membina masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya. PSKS ini diantaranya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK di Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Nagari, Karang Taruna, taruna siaga bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial/Orsos, Pendamping PKH, Sakti Peksos.



PSM dan TKSK Kab. Dharmasraya



Petugas Sakti Peksos : Melisa Yumarlis, S.Pd



**Pendamping Penyandang Disabilitas
YOSEP AGUNG PURNOMO. SP**



Pendamping PKH



Anggota TAGANA

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah PSKS yang terlatih dan profesional}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{155}{260} \times 100\%$$

$$= 59 \%$$

Kegiatan ini didukung oleh kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 yaitu Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Masyarakat, Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dengan anggaran.

Aplikasi dari kegiatan ini berupa pemberian pengganti transportasi selama 6 bulan dengan nominal Rp. 300.000,-/org/bulan dengan total Rp 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk PSM diberikan 6 bulan dengan nominal Rp 200.000,-/org/bulan dengan total Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Kegiatan ini sudah terealisasi seluruhnya (100%), Dengan penggantian transportasi diharapkan petugas sosial dilapangan tidak kesulitan untuk melaksanakan tugas sosialnya dalam penanggulangan permasalahan-permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada serta dalam membina potensi sosial (PSKS) diwilayah kerjanya masing-masing. Disamping kegiatan diatas juga dilaksanakan pembinaan terhadap pendamping dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk Kabupaten Dharmasraya yaitu Suku Anak Dalam (SAD) yang berjumlah 19 KK, 77 Jiwa dan 2 rombongan. Dari hasil pembinaan tersebut pada tahun ini sudah diterbitkan status kependudukan untuk SAD sebagai warga Kabupaten Dharmasraya yang sah, yang diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta kartu Jaminan Kesehatan Nasional.

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ditemukan suatu kendala dimana dengan adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan pengganti transportasi untuk PSM hanya 6 bulan dari 12 bulan dan TKSK sebanyak 6 bulan dari 12 bulan, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan dan pengambilan data kurang lancar.

2. Solusi

Solusi yang sudah dilaksanakan adalah memberikan pembinaan secara berkala serta memberikan motivasi terhadap PSM dan TKSK sehingga Tenaga Relawan dilapangan bisa bekerja secara maksimal.

1. Bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Yang terdampak bencana selama Tahun 2021 adalah 744 KK/7.754 jiwa dengan jumlah kejadian bencana 42 kali ditambah kasus Positif Covid 19. Kejadian bencana tidak bisa diprediksi karena terkait dengan alam dan lingkungan. Dalam hal pemberian dan distribusi bantuan tetap tersedia baik sisi dana maupun barang logistik. Semua korban bencana baik bencana alam maupun sosial mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat yang berasal dari Dana APBD Kab. Dharmasraya, Dinas Sosial Provinsi Sumbar dan Kemensos RI, sedang Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya. Besaran terhadap bantuan disesuaikan dengan interval kerugian dari korban. Capaian kinerja untuk kejadian bencana 25 kali kejadian, namun kejadian bencana selama tahun 2021 terjadi 42 kali kejadian bencana. Jadi dalam hal ini karena kejadian bencana tidak bias diprediksi, maka capaian kinerja disesuaikan dengan kejadian bencana.



Pemberian paket logistik kepada korban bencana



Evakuasi korban bencana ke tempat yang aman

(Dokumentasi : Dinas SOSP3APPKB, 2021)

m. Bantuan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Kejadian bencana pada tahun 2021 sebanyak 42 kali ditambah kasus positif covid 19, namun tidak semua kejadian bencana memerlukan proses evakuasi. Dari 42 kejadian bencana tersebut ada 16 (lima) melakukan proses evakuasi yakni :

No	Lokasi Kejadian Bencana	Jenis Bencana	Tgl Kejadian Bencana	Korban	Korban (Jiwa)	Jenis Bantuan
1	SINAMAR	PUTTING BELIUNG	4 JAN 2021	RIDHO FIRNANDO CS	63	- Logistik, Uang
2	SUNGAI KAMBUT	BENC. KEBAKARAN	3 MARET 2021	MARIATRI PUTRI	35	Logistik, Uang
3	SIKABAU	KORBAN BANJIR	12 JULI 201	- RUSDI CS	25	- Logistik
4	SITIUNG	BENC. KEBAKARAN	15 SEPT 2021	PONPES NURUL IMAN PISANG REBU	65	- Logistik, Uang
5	BANAI	BANJIR	1 NOV 2021	- RANDI	61	- Logistik
6	TIUMANG	BENC. KEBAKARAN	26 NOV 2021	SUNARDI, SUMARNO	10	- Logistik, Uang
7	SOPAN JAYA	BANJIR	12 DES 2021	- SUNARTO CS	372	- Logistik
8	TIUMANG	BANJIR	13 DES 2021	- SOUDI P CS	195	- Logistik

9	BONJOL	BANJIR	13 DES 2021	NICA UNHAIRA CS	660	- Logistik
10	ABAI SIAT	BANJIR	13 DES 2021	ZARANI, SM CS	312	- Logistik
11	ABAI SIAT	BANJIR	14 DES 2021	RIA YURISTIA CS	29	- Logistik
12	MUARO SOPAN	BANJIR	14 DES 2021	- HARLI CS	38	- Logistik
13	AMPANG KURANJI	BANJIR	14 DES 2021	- WENI LISTA CS	71	- Logistik
14	TEBING TINGGI	BANJIR	14 DES 2021	TANTEN SUGIARTO CS	3	- Logistik
15	AMPANG KURANJI	BANJIR	15 DES 2021	- WENI LISTA CS	14	- Logistik
16	KOTO SALAK	BANJIR	16 DES 2021	- ARMIZON CS	21	- Logistik
TOTAL KORBAN					2.091	

Bagi korban bencana yang memerlukan evakuasi, maka dilakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Proses melakukan evakuasi kerjasama instansi (BPBD, Dinas SOSP3APPKB, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, PU)

Bantuan dalam proses evakuasi bersumber dari dari Pemda Kab. Dharmasraya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Kemensos RI.



Tim Evakuasi (Tagana, Pemadam Kebakaran, SAR) siap melakukan evakuasi, sarana dan prasarana evakuasi

Dokumentasi : Dinas SOSP3APPKB, 2021)

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PMKS yang tertangani tahun 2021 adalah:

No	Uraian	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS Yg Menerima Bantuan	Satuan
1	Anak Balita Terlantar	1	1	Jiwa
2	Anak Terlantar	38	38	Jiwa
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	12	12	Jiwa
4	Anak Jalanan	0	0	Jiwa
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	67	8	Jiwa
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	12	12	Jiwa
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	35	35	Jiwa
8	Lanjut Usia Terlantar	46	46	Jiwa
9	Penyandang Disabilitas	351	173	Jiwa
10	Tuna Susila	-	-	
11	Gelandangan	17	17	Jiwa
12	Pengemis	4	4	Jiwa
13	Pemulung	-	-	Jiwa
14	Kelompok minoritas	-	-	Jiwa
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	149	135	Jiwa
16	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	28	28	Jiwa
17	Korban Penyalahgunaan NAFZA	6	4	Jiwa
18	Korban Trafficking	-	-	Jiwa
19	Korban tindak kekerasan	-	-	Jiwa
20	Pekerja Migran Bermasalah	-	-	Jiwa
21	Korban Bencana Alam	1.908	1.908	Jiwa
22	Korban Bencana Sosial	183	183	Jiwa
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.653	421	Jiwa
24	Fakir Miskin	132.591	129.530	Jiwa
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	57	57	Jiwa
26	Komunitas Adat Terpencil	77	77	Jiwa
JUMLAH		138.235	132.706	Jiwa

$$\% \text{ PMKS yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang menerima bantuan}}{\text{Jumlah PMKS seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\% \text{ PMKS yang tertangani} = \frac{132.706 \text{ Jiwa}}{138.235 \text{ Jiwa}} \times 100\%$$

$$\% \text{ PMKS yang tertangani} = 96\%$$

(Sumber Data: DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021)

SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DAN TERPENUHINYA HAK ANAK

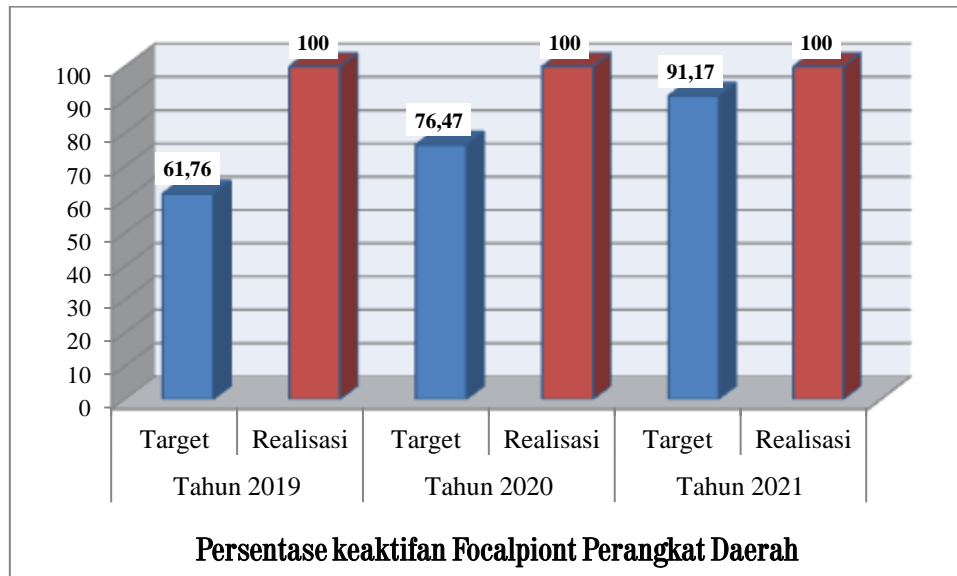
Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak”. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Kategori	Target Akhir RPJMD 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	%	61,76	100	161,92	76,47	100	130,77	91,17	100	109,69	Sangat berhasil	91,17		
2	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	90,47	90,47	100	95,23	95,23	100	100	100	100	Sangat berhasil	100		
3	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	Pratama	Pratama	100	Pratama	Tdk ada penilaian	100	Pratama	Madya	100	Sangat berhasil	Pratama		
Rata-rata data kelompok tertimbang													103,23	Sangat Berhasil	
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)													92,5		

Capaian strategis 2 mendapatkan rata-rata kelompok tertimbang **103,23** dengan kategori **sangat berhasil** dan nilai mean **92,5**, keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh 3 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase keaktifan focal point perangkat daerah



Grafik 3.3 Persentase Keaktifan focalpoint Perangkat Daerah

Realisasi pencapaian kinerja indikator keaktifan focal point perangkat daerah pada tahun 2021 sebesar 100% dengan target sebesar 91,17%. Keaktifan focal point perangkat daerah ini disebabkan pelatihan dan advokasi PPRG bagi anggota focal point OPD dan Instansi Vertikal se-kabupaten Dharmasraya dilaksanakan setiap tahun. Focal Point di setiap OPD yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut telah mampu memahami apa tugas pokoknya dan mampu untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan program yang ada pada OPD masing-masing. Ini dibuktikan dengan hasil penilaian dari Kantor Sekretariat Presiden (KSP) tentang Indikator Perencanaan Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender khususnya pada indikator penyusunan GAP dan GBS masing-masing OPD, disamping itu sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam strategi Pengarusutamaan Gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya diberikan penghargaan **Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama** oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2021, sudah 38 (tiga puluh delapan) OPD, 1 Instansi Vertikal dan 1 Perguruan Tinggi yang aktif melaksanakan pelaporan GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*).

Adapun focalpoint OPD dan Kecamatan yang aktif, adalah sebagai berikut:

No	Nama OPD	Aktif
1	Bappeda	√
2	Inspektorat	√
3	Dinas Pendidikan	√
4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	√
5	Dinas Kesehatan	√
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√
8	DINSOSP3APPKB	√
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	√
10	Badan Keuangan Daerah	√
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√
12	Badan penanggulangan Bencana Daerah	√
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	√
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	√
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√
17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	√
18	Dinas Perhubungan	√
19	Dinas Lingkungan Hidup	√
20	Dinas Pangan dan Perikanan	√
21	Dinas Pertanian	√
22	BKPSDM	√
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	√
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	√
25	Sekretariat Daerah	√
26	Rumah Sakit Umum daerah Sungai Dareh	√
27	Sekretariat DPRD	√
28	Kecamatan Pulau Punjung	√
29	Kecamatan Sembilan Koto	√
30	Kecamatan Sitiung	√
31	Kecamatan Padang Laweh	√
32	Kecamatan Timpeh	√
33	Kecamatan Koto Salak	√
34	Kecamatan Tiumang	√
35	Kecamatan Koto Baru	√
36	Kecamatan Koto Besar	√
37	Kecamatan Sungai Rumbai	√
38	Kecamatan Asam Jujuhan	√

Persentase di atas didapatkan dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Focal Point} = \frac{\text{Jumlah Focal Point}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

	38		
Focal Point =	38	×	100

Focal Point = 100%

Tercapainya Kinerja pada tahun 2021 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dimana anggaran dana sebesar Rp 48.172.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.805.400,- (97,16%).

Keberadaan Focal Point Pengarusutamaan Gender bagi perangkat daerah sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan komponen penting sebagai pionir dalam upaya mengedepankan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada program dan perencanaan pembangunan pada masing-masing Perangkat Daerah yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi perencanaan program dan bidang lainnya pada masing-masing OPD dan Instansi Vertikal serta memiliki pemahaman terhadap kerangka anggaran responsive gender.

Focal Point mempunyai tugas, sebagai berikut :

- ✓ Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- ✓ Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang Responsif Gender;
- ✓ Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
- ✓ Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
- ✓ Memfasilitasi penyusunan Profil Gender pada setiap SKPD;
- ✓ Mengkoordinir penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) pada beberapa kegiatan prioritas di SKPD yang bersumber dari APBD.

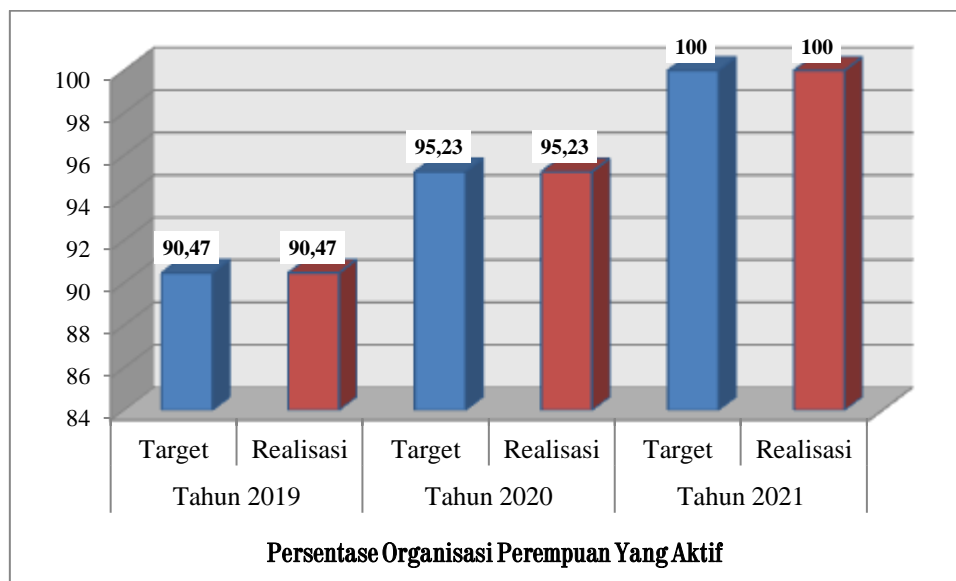
Kegiatan Pelatihan dan Advokasi PPRG bagi Focal Point PUG tahun 2020



Kegiatan Pelatihan dan Advokasi PPRG bagi Focal Point PUG OPD, Instansi Vertikal dan Perguruan Tinggi Tahun 2021



2. Persentase Organisasi Perempuan yang aktif



Grafik3.4 Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif

Persentase Organisasi Perempuan yang aktif adalah sebesar 100.00 %. Yang menjadi sasaran adalah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang aktif dalam pemberdayaan perempuan yaitu sebanyak 17 Organisasi. Untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi tersebut telah dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga organisasi mampu melaksanakan program-programnya. Adapun Organisasi Perempuan yang aktif di Kab. Dharmasraya, adalah sebagai berikut:

No	Organisasi Perempuan	Aktif
1	Gabungan Organisasi Wanita	√
2	Dharma Wanita Persatuan	√
3	Bhayangkari	√
4	Ikatan Adhyaksa Dharma Karini	√
5	Dharmayukti Karini	√
6	Persit Kartika Candra	√
7	Bundo Kanduang	√
8	Aisyah	√
9	Salimah	√
10	Wanita Islam	√
11	Nasyatul Aisyiah	√
12	Ikatan Bidan Indonesia	√
13	Iwabri	√
14	Isbanda	√
15	Mslimat	√
16	Fatayat	√
17	PIWR	√

$$\text{Organisasi Perempuan} = \frac{\text{Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Perempuan}} \times 100\%$$

$$\text{Organisasi Perempuan} = \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$\text{Organisasi Perempuan} = 100,00 \%$$

Realisasi pencapaian kinerja tahun 2021 sudah 100% atau target dalam perjanjian kinerja terealisasi dengan sempurna. Tercapainya Kinerja pada tahun 2021 didukung oleh Kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 yaitu kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota dalam Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Anggaran kegiatan sebesar Rp.660.043.200,- dengan realisasi sebesar Rp.641.306.021,- (97,16 %).

3. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Tahun	Target	Realisasi
2019	Pratama	Pratama
2020	Pratama	Tdk ada Penilaian
2021	Pratama	Madya

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Langkah – langkah dalam pengembangan KLA terdiri atas :

- ✓ Tahap persiapan
- ✓ Tahap perencanaan
- ✓ Tahap pelaksanaan
- ✓ Tahap pemantauan dan evaluasi
- ✓ Tahap pelaporan

Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan kriteria dan point sebagai berikut :

- ✓ 500 s/d 600 point untuk predikat Pratama
- ✓ 600 s/d 700 point untuk predikat Madya
- ✓ 700 s/d 800 point untuk predikat Nindya
- ✓ 800 s/d 900 point untuk predikat Utama
- ✓ Diatas 900 point untuk predikat Kabupaten/Kota Layak Anak

Indikator Kinerja Kabupaten Layak Anak pada tahun 2021 dengan indikator sasaran *Predikat / penghargaan* dengan target predikat *pratama*.



Berdasarkan hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2021, Kabupaten Dharmasraya mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak **Predikat Madya**. Pencapaian ini melebihi dari target yang ditetapkan, dimana untuk tahun 2021 target indikator Kinerja Kabupaten Layak Anak **Predikat Pratama**. Hal ini didukung oleh kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan pemenuhan hak anak diantaranya kegiatan Pelatihan Musrenbang bagi Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Nagari. Pemenuhan hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan kegiatan pembinaan pada 6 (enam) Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak antara lain Puskesmas Sungai Dareh, Puskesmas Sitiung I, Puskesmas Sungai Rumbai, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Koto Baru dan Puskesmas Timpeh. Pemenuhan hak anak atas pendidikan dengan kegiatan pembinaan pada sekolah-sekolah yang telah diinisiasi menjadi sekolah rintisan pengembangan sekolah ramah anak. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak serta pembinaan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak pada 11 (sebelas) Kecamatan dan Gugus Tugas Nagari layak anak pada 5 (lima) Nagari.

Capaian indikator kinerja Kabupaten/Kota Layak Anak didukung oleh kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota dalam program Pemenuhan Hak Anak, anggaran kegiatan sebesar 67.072.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.274.450,-(98,81%).

Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021



SASARAN STRATEGIS 3
BERKURANGNYA ANGKA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

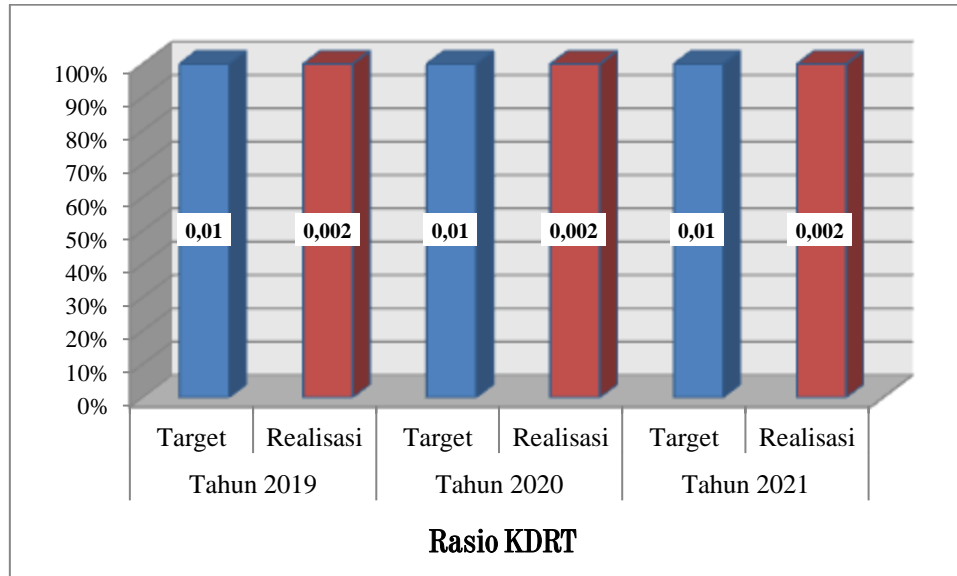
Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan”. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Kategori	Target RPJMD 2021
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Rasio KDRT	%	0,01	0,002	100	0,01	0,002	100	0,01	0,002	100	Sangat Berhasil	0,01
2	Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100
3	Rasio anak korban kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil	100
Rata-rata data kelompok tertimbang											100	Sangat Berhasil	
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)												92,5	

Capaian strategis 3 mendapatkan rata-rata kelompok tertimbang **100** dengan kategori **sangat berhasil** dan nilai mean **92,5**, keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh 3 indikator kinerja yaitu:

1. Rasio KDRT



Gambar 3.5 Rasio KDRT

Angka KDRT di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu 1 kasus. Hal ini terjadi salah satunya karena kegiatan pencegahan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang KDRT, baik pencegahan dan penanganannya. Namun dapat juga menggambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT dikarenakan berbagai faktor. Sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah kekerasan di dalam rumah tangga masih merupakan tabu bagi keluarga dan tidak perlu di laporkan. Kasus KDRT merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan, beranjak dari hal tersebut pada tahun 2021 Dinas SOSP3APPKB melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat inovasi SALING SAPA (Konsultasi Pelayanan Keliling Sahabat Perempuan dan Anak) yang memberikan layanan konseling bagi perempuan korban KDRT dan layanan pengaduan secara online yang menjamin kerahasiaan pelapor melalui link pengaduan [bit.ly//salingsappa](https://bit.ly/salingsappa).



Data dari Dinas SOSP3APPKB dan P2TP2A Tahun 2021 sebanyak 1 kasus dari jumlah rumah tangga sebanyak 68.321 RT.

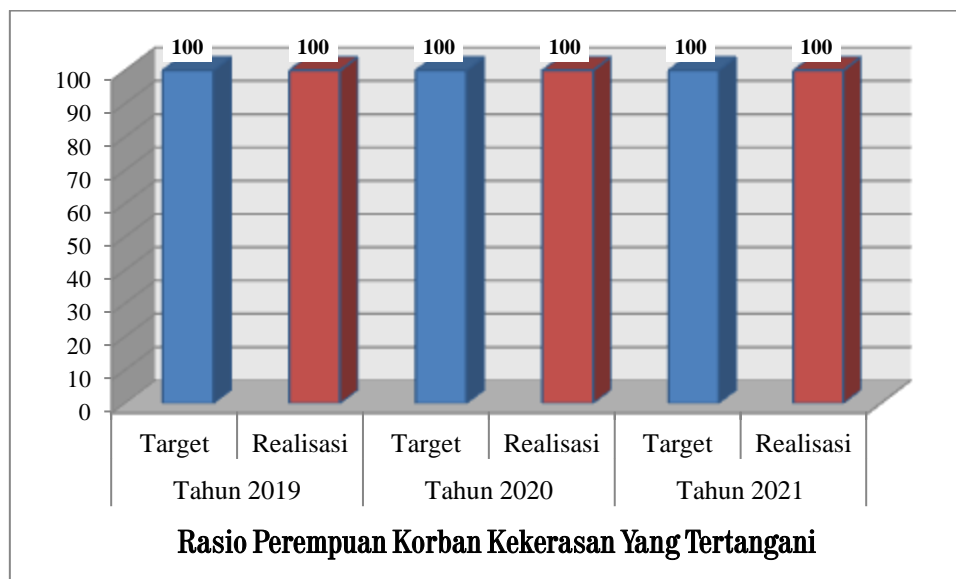
Dari persentase di atas didapatkan dari rumus sebagai berikut :

$$\text{KDRT} = \frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

$$\text{KDRT} = \frac{1}{68.321} \times 100\% = 0,002$$

Hasil capaian kinerja untuk rasio KDRT sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya upaya pencegahan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan perlindungan perempuan dan anak sehingga perempuan yang mendapatkan kekerasan sudah mulai melaporkan kasusnya ke unit pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas SOSP3APPKB, meskipun belum semua masyarakat terpapar informasi tersebut. Pencapaian ini juga didukung oleh adanya anggaran dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 75.286.550,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.736.400,- (99,27%)

2. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani



Grafik 3.6 Rasio Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani

Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi cakupan perempuan korban kekerasan yang tertangani mencapai 100%, ini berarti bahwa semua perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya sudah mendapatkan layanan penjangkauan serta layanan rujukan dan pendampingan. Cakupan ini disebabkan adanya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat, pembentukan jejaring perlindungan perempuan di tingkat kecamatan dan nagari, penjangkauan kasus-kasus kekerasan serta kegiatan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan mengoptimalkan penanganan

dan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu pada tahun 2021, Dinas SOSP3APPKB menyediakan layanan pengaduan secara online bagi masyarakat yang akan melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan melalui link pengaduan bit.ly//salingsappa.

Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak salah satu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan. Pada tahun 2021 terdapat 3 kasus kekerasan terhadap perempuan dan telah mendapatkan layanan penjangkauan, pendampingan psikologis dan bantuan hukum.

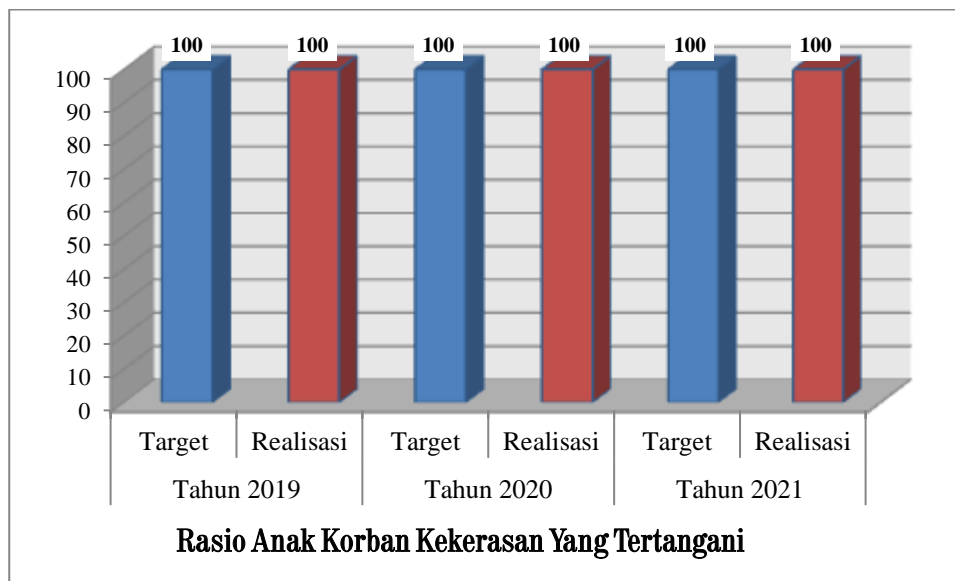


Data tersebut di atas diperoleh dari data Dinas SOSP3APPKB Tahun 2021 sebanyak 3 Kasus. Dari persentase di atas didapatkan dari rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani} \\ & = \frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan}} \times 100\% \\ & = \frac{3}{3} \times 100\% = 100 \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 realisasi cakupan perempuan korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada layanan perlindungan perempuan dan anak Bidang PPPA dengan capaian kinerja 100%, hal ini terjadi karena setiap laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan diberikan layanan penjangkauan dan pendampingan oleh petugas. Pencapaian ini juga didukung oleh adanya anggaran dari kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan lingkup Daerah Kab/Kota pada program Perlindungan Perempuan sebesar 75.286.550,- dengan realisasi sebesar Rp.74.736.400,- (99,27%).

3. Rasio anak korban kekerasan yang tertangani



Grafik 3.7 Rasio Anak Korban Kekerasan yang Tertangani

Pada tahun 2021 realisasi cakupan anak korban kekerasan yang tertangani mencapai 100%, ini berarti bahwa semua anak korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya sudah mendapatkan layanan penjangkauan serta layanan rujukan dan pendampingan. Cakupan ini disebabkan adanya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada masyarakat, pembentukan jejaring perlindungan anak di tingkat kecamatan dan nagari, penjangkauan kasus-kasus kekerasan serta kegiatan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan mengoptimalkan penanganan dan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu pada tahun 2021, Dinas SOSP3APPKB menyediakan layanan pengaduan secara online bagi masyarakat yang akan melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap anak melalui link pengaduan bit.ly//salingsappa.

Layanan perlindungan Perempuan dan Anak salah satu tugas dan fungsinya melakukan upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.

Data Dinas SOSP3APPKB Tahun 2021 sebanyak 6 Kasus. Dari persentase di atas didapatkan dari rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Rasio anak korban kekerasan yang tertangani} \\ &= \frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100 \end{aligned}$$

Pencapaian ini juga didukung oleh adanya anggaran dari kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan lingkup Daerah Kab/Kota pada program Perlindungan Perempuan sebesar 75.286.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.736.400,- (99,27%).



SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA KETERLIBATAN PUS DALAM KB

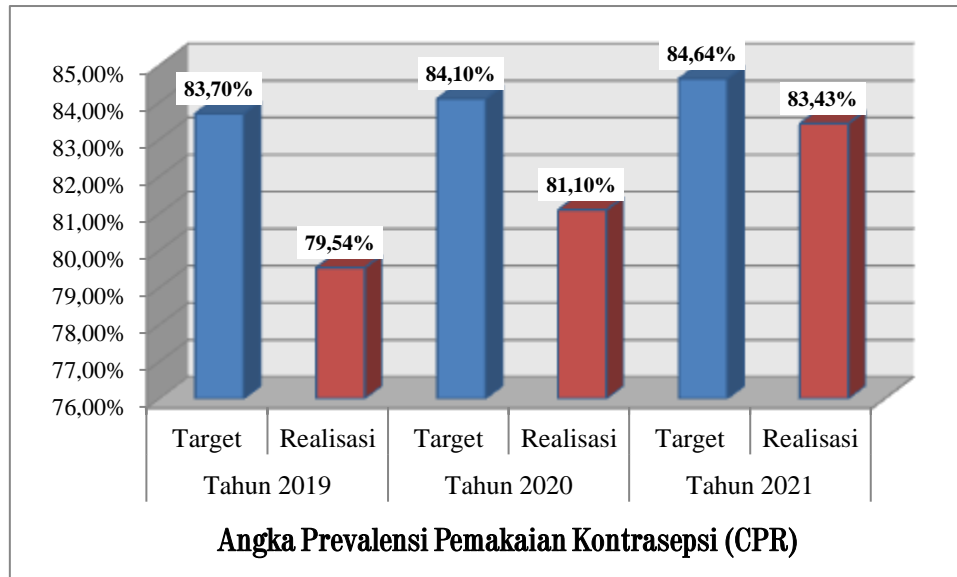
Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “Meningkatnya pengendalian penduduk melalui keluarga yang berkualitas”. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Kategori	Target RPJMD 2021
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	83,70	79,54	95,02	84,10	81,10%	96,9%	84,64	83,43%	98,57%	Sangat berhasil	84,68
2	Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need)	%	10,12	10,75	106,22	10,12	10,29%	101,67	8,09	8,17%	100,98%	Sangat berhasil	8,09
Rata-rata data kelompok tertimbang											99,77	Sangat berhasil	
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)												92,5	

Capaian strategis 4 mendapatkan rata-rata kelompok tertimbang **99,77** dengan kategori **sangat berhasil** dan nilai mean **92,5**, keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu:

1. Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)



Grafik 3.8 Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 adalah 81,10%, sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 83,43% (meningkat 2,33%). Peningkatan ini dikarenakan adanya kegiatan Pelayanan Kontrasepsi di setiap wilayah Kabupaten Dharmasraya dan Kegiatan Daerah yang ada di Kecamatan contohnya Gerakan Masyarakat (GERMAS). Melalui kegiatan Gernas tersebut dilakukan Pelayanan Kontrasepsi sehingga berdampak terhadap meningkatkannya Jumlah CPR di Kabupaten Dharmasraya. Dengan Meningkatnya CPR akan menurunkan angka total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran.

Data ini didapatkan dengan rumus:

$$CPR = \frac{\text{Peserta KB katif (PA)}}{\text{Pasangan usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

$$CPR = \frac{36999 \text{ (PA)}}{44349 \text{ (PUS)}} \times 100\%$$

$$CPR = 83,43\%$$

(Sumber data : Dinsosp3appkb dan hasil Pelayanan Kontrasepsi, Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) Kabupaten Dharmasraya tahun 2021).

Adapun faktor yang mendukung peningkatan angka CPR dari tahun sebelumnya adalah:

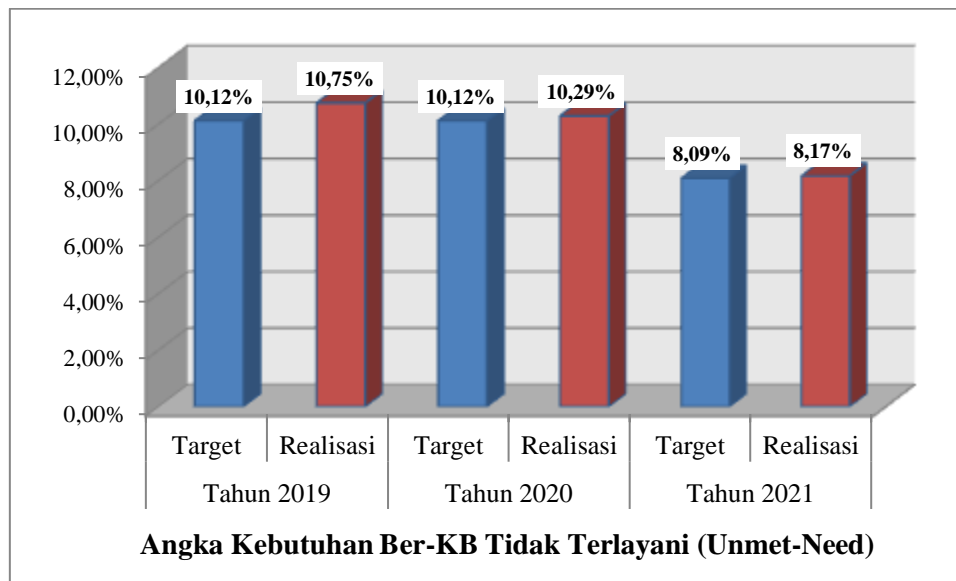
- a. Adanya Petugas PLKB dan PPKBD/Sub.PPKBD tingkat Kecamatan dan Jorong .
- b. Adanya Kader Andalan di Setiap Kecamatan.
- c. Adanya Kegiatan Pelayanan KB di Paskes (RSU, Puskesmas, Polindes, Pokesri, Dan Klinik Swasta Serta Dokter, Bidan Praktek Swasta.)
- d. Adanya Kegiatan Pelayanan KBKR Bersama Mitra Kerja Dalam rangka hari Kontrasepsi Sedunia dan Hari Vasektomi sedunia.
- e. Adanya Kegiatan Pelayanan Serentak melalui Momentum Bakti Sosial :
 - ✓ Pelayanan KB Serentak Bulan Kreativitas PLKB bln Januari s/d Maret 2021.
 - ✓ Pelayanan KB serentak Bakti Sosial IBI.KB-KES. Bulan Februari s/d Juni 2021
 - ✓ Pelayanan KB Serentak Bakti Sosial TNI.KB-KES.Bulan Juli s/d September 2021
 - ✓ Pelayanan KB serentak Bhakti Sosial Kesatuan Gerak PKK. KB-KES.
 - ✓ Pelayanan Daerah Perbatasan

Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Keluarga Berencana pada kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan pagu Dana sebesar RP. 648.178.000,- dengan Realisasi sebesar 632.033.900 (99,35%).



Pelayanan Kontrasepsi Serentak Bulan Kreativitas PLKB

2. Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need)



Grafik 3.9 Angka Kebutuhan Ber-KB Tidak Terlayani

Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need) terjadi peningkatan pada tahun 2021 (8,17%) dibandingkan tahun 2020 (10,29%).

Hal ini di karenakan pemaksimalan Advokasi oleh PLKB dan juga oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat di daerah Perbatasan terpencil dan Transmigrasi tentang manfaat ber KB dengan cara melakukan Pelayanan Kontrasepsi di daerah perbatasan. Salah satu contoh tempat pelayanan Unmet Need di daerah perbatasan adalah di kecamatan Asam Jujuhan. Sebelum melakukan Pelayanan kontrasepsi disetiap wilayah perbatasan terlebih dahulu melakukan Peyuluhan Keluarga Berencana agar Masyarakat antusias untuk menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga angka kebutuhan ber KB yang tidak terlayani menurun dimana semakin rendah angka Unmet Need semakin tinggi prevalensi Pemakain Kontrasepsi (CPR).

diantaranya Kegiatan Pelayanan Serentak melalui Momentum Bakti Sosial :

- ✓ Pelayanan KB Serentak Bulan Kreativitas PLKB bln Januari s/d Maret 2021.
- ✓ Pelayanan KB serentak Bakti Sosial IBI.KB-KES. Bulan Februari s/d Juni 2021
- ✓ Pelayanan KB Serentak Bakti Sosial TNI.KB-KES.Bulan Juli s/d September 2021
- ✓ Pelayanan KB serentak Bhakti Sosial Kesatuan Gerak PKK. KB-KES.
- ✓ Pelayanan Daerah Perbatasan

Sebelum melakukan Pelayanan kontrasepsi diseluruh Kecamatan terlebih dahulu melakukan Peyuluhan Keluarga Berencana agar Masyarakat antusias untuk menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga angka kebutuhan ber KB yang tidak terlayani menurun dimana semakin rendah angka Unmet Need semakin tinggi prevalensi Pemakain Kontrasepsi (CPR).

Adapun penyebab terjadinya Unmeet Need adalah :

1. Jauhnya dari jangkauan Fasilitas Kesehatan dari Pelayanan KB.
2. Kurangnya Pengetahuan tentang Manfaat ber KB oleh Masyarakat yang ada di wilayah Perbatasan dan daerah terpencil.

3. Kurangnya Informasi tentang Program KKBPK yang diperoleh oleh Masyarakat Unmet Need tersebut.

$$\text{Unmet Need} = \frac{\text{Ingin Anak ditunda (IAT)} + \text{Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)}}{\text{Pasangan usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

$$\text{Unmet Need} = \frac{1898 + 1725}{44349} \times 100\%$$

$$\text{Unmet Need} = 8,17\%$$

Sumber data : Dinsosp3appkb dan hasil Pelayanan Kontrasepsi, kebutuhan ber KB tidak terlayani (Unmet Need) Kabupaten Dharmasraya tahun 2021

Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Keluarga Berencana pada kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dengan pagu Dana sebesar RP. 648.178.000,- dengan Realisasi sebesar 632.033.900 (99,35%).



Pelayanan Kontrasepsi Serentak Bulan Kreativitas PLKB



Pelayanan Kontrasepsi di TNI KB KES 2021

SASARAN STRATEGIS 5
MENINGKATNYA KESEJATERAAN KELUARGA

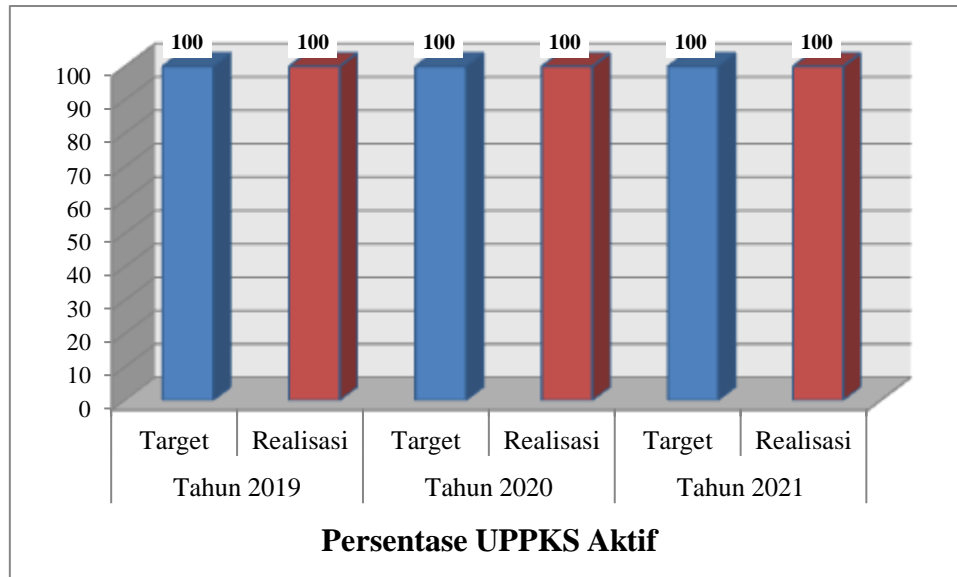
Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: “Meningkatnya pengendalian penduduk melalui keluarga yang berkualitas”. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kelima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Kategori	Target RPJMD 2021
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sangat berhasil	100
2	Persentase Kelompok Tribina yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sangat berhasil	100
Rata-rata data kelompok tertimbang											100	Sangat berhasil	
Rata-rata capaian sasaran (Nilai Mean)												92,5	

Capaian strategis 5 mendapatkan rata-rata kelompok tertimbang **100** dengan kategori **sangat berhasil** dan nilai mean **92,5**, keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu:

1. Pesentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif



Grafik 3.10 Persentase Kelompok UPPKS Aktif

Persentase Kelompok Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya pembinaan kepada Kelompok UPPKS di setiap wilayah, dan bantuan dana dari Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupa Kompor Gas, Oven dan Kualu Besar (Kanca) di Kenagarian Batu Rijal Kecamatan Padang laweh.

Pada tahun 2021 Pesentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif adalah 100% dengan realisasi 100% atau 100%, dimana UPPKS merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana, dengan tujuan:

- a. Untuk mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif,
- b. Untuk mensosialisasikan pengolahan keuangan keluarga,
- c. Untuk membantu meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga,
- d. Untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
- e. Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Keluarga

Pencapaian 100% ini dikarenakan adanya Kelompok UPPKS memberikan kesempatan keluarga yang berpendapatan rendah untuk berkreatifitas dan berinovasi menghasilkan suatu karya contohnya kerajinan tangan guna meningkatkan pendapatan keluarga melalui pembinaan di setiap kelompok UPPKS dan mitra kerja dengan pembinaan OPD (KUMPERDAG) dan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kelompok UPPKS yang ada di kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 :

No	Kelompok UPPKS	Aktif
1	UPPKS Berkah	√
2	UPPKS Usaha Daya	√
3	UPPKS Adi Karya	√
4	UPPKS Mulya Bersama	√
5	UPPKS Harapan Bangsa	√
6	UPPKS Amanah	√
7	UPPKS Batik Jambak	√
8	UPPKS Bank sampah	√
9	UPPKS Cahaya	√
10	UPPKS SKZ Souvenir	√
11	UPPKS Kamboja	√
12	UPPKS Sayang Bundo	√
13	UPPKS Tani Sadar	√
14	UPPKS Usaha Tempe Mbah Magiem	√
15	UPPKS Tiga Putra	√
16	UPPKS Aur Kuning Jaya	√
17	UPPKS Dua Putri	√
18	UPPKS Suka Maju	√
19	UPPKS Bougenvil	√
20	UPPKS Harapan Jaya	√
21	UPPKS Sumber Rezeki	√
22	UPPKS Harapan Bunda	√
23	UPPKS Kurnia Jaya	√
24	UPPKS Dahlia Koto Ateh	√
25	UPPKS Mandeh Maimbau	√
26	UPPKS Sehati	√
27	UPPKS Sedasi	√
28	UPPKS Dahlia	√
29	UPPKS Sepakat	√
30	UPPKS Angelir	√
31	UPPKS Anggarini	√
32	UPPKS Mekar	√
33	UPPKS Bhakti Wanita	√
34	UPPKS Karya	√
35	UPPKS Saiyo	√
36	UPPKS Niaga	√

$$\text{UPPKS} = \frac{\text{Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif}}{\text{Jumlah Kelompok UPPKS yang ada}} \times 100\%$$

$$\text{UPPKS} = \frac{36}{36} \times 100\%$$

$$\text{UPPKS} = 100\%$$

Adapun faktor yang mendukung Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif adalah :

- Adanya Pembinaan pada Kelompok UPPKS
- Adanya bantuan dana dan alat media dari Provinsi pada kelompok Tri Bina
- Adanya Operasional Kader UPPKS

(Sumber data : Dinsosp3appkb dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Dharmasraya tahun 2021)

Dari 35 kelompok UPPKS yang ada sudah dilakukan sosialisasi dan Pembinaan di setiap Kelompok sehingga Kelompok tersebut mampu menghasilkan karyanya masing- masing, dengan adanya Program Keluarga Berencana pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal pada sub menu kegiatan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan) dengan Pagu Dana sebesar Rp. 248.600.000,- dengan realisasi Rp. 248.600.000,- (100%).

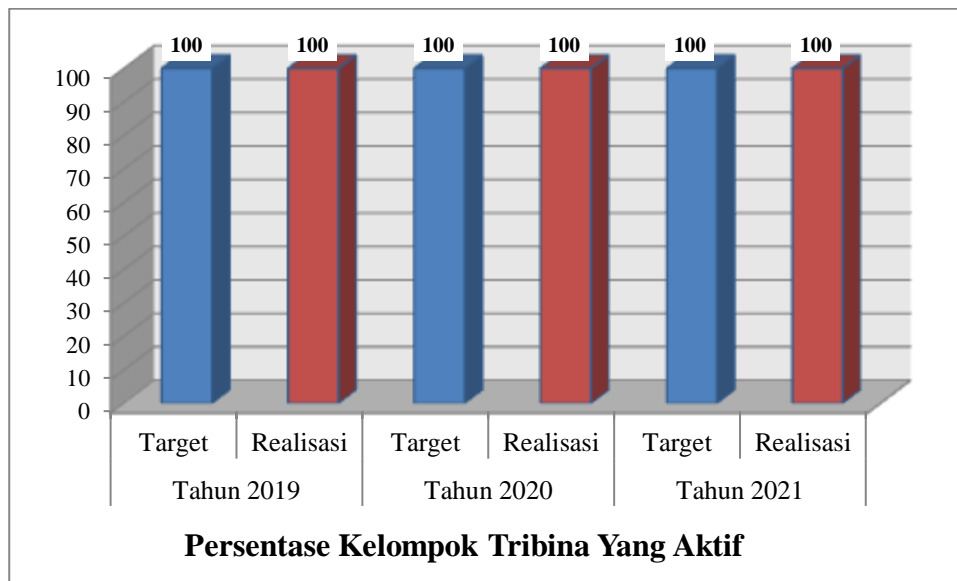


Penyerahan Bantuan Dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat ke Kelompok UPPKS



Sosialisasi dan Pembinaan Kegiatan UPPKS di Setiap Kecamatan

2. Pesentase kelompok tribina yang aktif



Grafik 3.11 Persentase Kelompok Tribina yang Aktif

Persentase kelompok tribina yang aktif pada tahun 2020 dan 2021 (100%). hal ini disebabkan adanya pembinaan dan sosialisasi secara rutin ke setiap wilayah kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Dharmasraya serta dengan mengadakan pelatihan ke kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL).

Pada tahun 2020 dan 2021 Pesentase Tribina yang Aktif adalah 100 % dengan realisasi 100% atau capaiannya 100%. Dimana kelompok tribina itu adalah BKB (Bina Kelompok Balita), BKR (Bina Kelompok Remaja) dan BKL (Bina Kelompok Lansia). Kelompok BKB Merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina keluarga balita. BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalau komunikasi defektif anatas orang tua dan anak remaja. Sedangkan BKL merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pangasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahetraannya.

Pencapaian indikator kinerja 100 %, ini dikarenakan adanya Sosialisasi dan Pembinaan terhadap keluarga yang punya anak Balita, keluarga yang punya anak remaja dan keluarga yang punya lansia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak balita, remaja serta memberdayakan lansia yang ada pada keluarga. Dan dengan dilengkapinya sarana pra sarana Kader TRI Bina seperti Contoh BKB KIT, BKL KIT dan buku-buku panduan untuk Kader atau kelompok Tribina.

Pembahasan pada kelompok BKB adalah penyuluhan/ Advokasi KIE Kecerdasan, komunikasi pasif, aktif dan gerakan Motorik. Pada kelompok BKR adalah penyuluhan/ Advokasi KIE komunikasi Orang tua dengan remaja, tentang Kebersihan dan kesehatan diri remaja, bina Keluarga Remaja dalam mewujudkan Generasi Berencana.

Sedangkan pembahasan BKL adalah penyuluhan/ Advokasi KIE 7 dimensi lansia tangguh ditinjau dari spritual, intelektual, fisik, sosialisasi dan lingkungan mewujudkan lansia tangguh dengan meningkatkan 8 fungsi agama, pembinaan fisik bagi lansia

Adapun faktor yang mendukung Kelompok Tribina yang aktif adalah :

- Adanya Pembinaan pada Kelompok Tribina
- Adanya bantuan dana dan alat media dari Provinsi pada kelompok tribina (BKB KIT, BKL KIT dan GenRe KIT)
- Adanya Operasional Kader tribina

NO	KELOMPOK TRIBINA	JUMLAH	AKTIF
1	BKB (Bina Kelompok Balita)	102	102
2	BKR (Bina Kelompok Remaja)	56	56
3	BKL (Bina Kelompok Lansia)	62	62
JUMLAH		220	220

$$\text{TRIBINA} = \frac{\text{Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) yang aktif}}{\text{Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) yang ada}} \times 100\%$$

$$\text{TRIBINA} = \frac{102+56+62}{102+56+62} \times 100\%$$

$$\text{TRIBINA} = 100\%$$

(Sumber data : Dinsosp3appkb dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Dharmasraya tahun 2021)





Kegiatan Tribina dan Tribina Tingkat Kecamatan di Kab. Dharmasraya

Dari 220 kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) telah dilakukan sosialisasi dan Pembinaan di setiap Kelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak balita, remaja serta memberdayakan lansia yang ada pada keluarga. dimana kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) kemudian hal ini didukung dengan adanya Program Keluarga Berencana pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal pada sub menu kegiatan Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan) dengan Pagu Dana sebesar Rp. 248.600.000,- dengan realisasi Rp. 248.600.000,- (100%).

C. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, didukung dengan dana sejumlah **Rp.9.226.434.950,-** (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tak langsung **Rp.2.439.251.000,-** dan Alokasi belanja langsung sebesar **Rp.6.787.183.950,-**. Dengan realisasi belanja tak langsung sebesar **Rp.2.439.251.000,- (96,67%)** dan sisanya sebesar **Rp81.241.777,- (3,33%)** sedangkan untuk realisasi belanja langsung sebesar **Rp.6.705.989.201,- (98,80%)** dan sisanya sebesar **Rp.81.194.749,- (1,20%)**. Adapun rincian penggunaan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

A. REALISASI BELANJA TAK LANGSUNG

TABEL 3.6

NO	URAIAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.439.251.000	2.358.009.223	96,67%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>2.439.251.000</i>	<i>2.358.009.223</i>	<i>96,67%</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.439.251.000	2.358.009.223	96,67%
	Gaji Pokok ASN	1.343.662.000	1.312.582.600	97,69%
	Tunjangan Keluarga	119.886.000	115.430.272	96,28%
	Tunjangan Jabatan	199.070.000	193.010.000	96,96%
	Tunjangan Fungsional Umum	21.535.000	19.050.000	88,46%
	Tunjangan Beras	76.006.000	72.709.680	95,66%
	Tunjangan PPh	3.432.000	2.397.303	69,85%
	Pembulatan Gaji	23.000	20.082	87,31%
	Iuran Jaminan Kesehatan	81.480.000	74.575.829	91,53%
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.926.000	1.911.920	65,34%
	Iuran Jaminan Kematian	8.280.000	5.735.820	69,27%
	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	6.014.000	3.981.827	66,21%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	576.937.000	556.603.890	96,48%

B. REALISASI BELANJA LANGSUNG

TABEL 3.7

NO	URAIAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.440.685.000	1.422.501.530	98,74%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	220.593.000	220.480.250	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.960.000	3.939.000	99,47%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.952.000	47.951.650	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.998.500	4.992.000	99,87%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.980.000	13.980.000	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.786.100	54.781.100	99,99%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.916.400	94.836.500	99,92%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	9.000.000	9.000.000	100%
	Pengadaan Mebel	9.000.000	9.000.000	100%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.058.622.000	1.044.884.084	98,70%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.998.000	7.990.000	99,90%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.804.000	49.734.084	86,04%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	992.820.000	987.160.000	99,43%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	152.470.000	148.137.196	97,16%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	18.661.253	98,22%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.300.000	121.405.943	96,89%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.170.000	8.070.000	98,78%
2	Program Pemberdayaan Sosial	90.832.200	90.621.800	99,77%
	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	90.832.200	90.621.800	99,77%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.168.400	60.131.250	99,94%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	30.663.800	30.490.550	99,44%
3	Program Rehabilitasi Sosial	63.365.550	63.239.750	99,80%
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>63.365.550</i>	<i>63.239.750</i>	<i>99,80%</i>
	Penyediaan Alat Bantu	15.200.000	15.200.000	100%
	pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000	5.000.000	100%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	43.165.550	43.039.750	99,71%
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	93.417.800	93.379.300	99,96%
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>93.417.800</i>	<i>93.379.300</i>	<i>99,96%</i>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.417.800	93.379.300	99,96%
5	Program Penanganan Bencana	540.967.000	540.680.550	99,95%
	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>540.967.000</i>	<i>540.680.550</i>	<i>99,95%</i>
	Penyediaan Makanan	540.967.000	540.680.550	99,95%
6	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	708.215.200	688.111.421	97,16%
	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>48.172.000</i>	<i>46.805.400</i>	<i>97,16%</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	48.172.000	46.805.400	97,16%
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>660.043.200</i>	<i>641.306.021</i>	<i>97,16%</i>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	660.043.200	641.306.021	97,16%
7	Program Perlindungan Perempuan	75.286.550	74.736.400	99,27%
	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>75.286.550</i>	<i>74.736.400</i>	<i>99,27%</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.286.550	74.736.400	99,27%
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	67.072.400	66.274.450	98,81%
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>67.072.400</i>	<i>66.274.450</i>	<i>98,81%</i>

	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.072.400	66.274.450	98,81%
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.631.989.000	3.591.208.600	98,88%
	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	2.476.047.000	2.450.280.900	98,96%
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2.476.047.000	2.450.280.900	98,96%
	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.155.942.000	1.140.927.700	98,70%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10.000.000	10.000.000	100%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.145.942.000	1.130.927.700	98,69%
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	75.353.250	75.235.400	99,84%
	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	75.353.250	75.235.400	99,84%
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.353.250	75.235.400	99,84%
JUMLAH		6.787.183.950	6.705.989.201	98,80%

D. Prestasi yang di capai

Tabel 3.8
PRESTASI YANG DITERIMA DINSOSP3APPKB TAHUN 2021

No	Jenis Kegiatan	Tahun
1	Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2021	2021
2	Kabupaten Penerima Anugrah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Pratama	2021
3	Terbaik II Pengelolaan Program Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020	2021
4	Terbaik II Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) Provinsi Sumatera Barat	2021
5	Juara I Lomba SAKIP	2021
6	Juara I Lomba Agent of Chance	2021
7	Juara II Lomba Inovasi Pelayanan Publik	2021
8	Juara II Lomba Kematangan Organisasi	2021

E. Inovasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Lomba Bulan RB 2021 menerbitkan 4 inovasi yaitu:

1. SIUL SEDIKIT (Sungai Limau Peduli Secibit Jadi Bukit)
2. UP2K BISA TOP (Upaya Peningkatan pendapatan keluarga Melalui Inovasi Biji Salak Jadi Teh Kopi)
3. OKE GAYA SAYA DE POSDAYA (Zero Kemiskinan Keluarga Berdaya Masyarakat Jaya Dengan Pos Pemberdayaan Keluarga)
4. SALING SAPA (Konsultasi Pelayanan Keliling Sahabat Perempuan Dan Anak)

Dari 4 inovasi, satu diantaranya mendapatkan JUARA II dalam pelaksanaan lomba bulan RB Tahun 2021. Inovasi tersebut ialah SIUL SEDIKIT (Sungai Limau Peduli Secibit Jadi Bukit).

Kegiatan SIUL SEDIKIT ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan hasil buah sawit dan karet baik milik jorong dan nagari yang tanah pembelian lahan berasal dari masyarakat. Hasil buah sawit dan karet milik masyarakat yang langsung dipotong 2,5% setiap panen. Iuran tokoh-tokoh masyarakat sebesar Rp.5.000,-/bulan, Hasil Pendapatan Asli Nagari (PAN) serta Pemotongan Honor Perangkat Nagari sebesar 2,5 %. adanya inovasi ini anak sekolah pada awalnya yang terbantu 25 orang dan guru 9 orang bisa meningkat 100%. Peningkatan ini terjadi karena komitmen, pengelolaan, manajemen dan transparansi pengurus sudah bagus. Disinilah inovasi “SIUL SEDIKIT” (**Sungai Lima Peduli Secibit Jadi Bukit**) mempunyai makna yang sangat berarti dana yang pada awalnya sedikit jadi banyak, sementara sasaran penerima dari awalnya sedikit juga jadi banyak.

◆ Tujuan Inovasi

Tujuan inovasi ini adalah menyatukan berbagai ide dan gagasan baik dari masyarakat maupun *stake holder* agar anak putus sekolah bisa sekolah kembali, bagi yang benar-benar tidak dapat melanjutkan sekolah diberikan pelatihan keterampilan, ibu hamil dan balita yang mengarah pada keadaan kurang gizi bisa terpenuhi gizinya agar bayi yang dilahirkan dan anak balita dapat tumbuh kembang sesuai dengan tingkat usianya, lansia dan wanita sebagai kepala rumah tangga yang mengalami masalah rawan ekonomi bisa dibantu melalui usaha ekonomi produktif atau modal usaha, Keluarga yang tidak mampu lagi karena kondisi sakit atau lumpuh dibantu kebutuhan logistik.

◆ Signifikansi (Arti Penting)

Inovasi ini berperan penting dalam meningkatkan Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai tuntutan dari Tujuan Negara Indonesia khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial khususnya masalah anak terlantar, lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar yang harus dicapai oleh Kabupaten Dharmasraya. SIUL SEDIKIT menginspirasi masyarakat untuk berinovasi, memberikan sedekah sesuai kemampuan yang ada, saling berbagi, saling ketergantungan satu sama lain. Dimulainya inovasi ini berawal dari kepedulian seorang relawan sosial yang ada di Nagari Sungai Limau yang bernama Emner. Dimana dia melihat banyaknya anak-anak yang tidak mampu bayar uang sekolah yang berakibat putus sekolah, ibu-ibu hamil dan balita yang kurang gizi, lansia dan

wanita sebagai kepala rumah tangga yang perlu uluran tangan dan keluarga yang memerlukan logistik karena kondisi yang memang benar-benar sudah tidak mampu, menggugah hatinya untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintahan Nagari. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan respon, pihak pemerintahan Nagari melakukan koordinasi dengan Dinas SOSP3APPKB, maka muncullah inovasi “*Sungai Limau Peduli Secibit Jadi Bukit*” disingkat “*SIUL SEDIKIT*” dengan beberapa kegiatan membayarkan uang sekolah anak dan membayarkan gaji guru mengaji dan MDA, memberikan pelatihan keterampilan, memberikan bantuan untuk peningkatan gizi, bantuan usaha ekonomi produktif/modal usaha dan bantuan logistik.

◆ **Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian)**

Kegiatan inovasi ini adalah suatu terobosan baru karena kegiatan ini muncul dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Disini masyarakat sebagai *agent of change*. Pada awalnya ninik mamak dan tokoh masyarakat berurusan membeli lahan untuk ditanami sawit maupun karet dengan tujuan untuk membantu anak dan kemenakan untuk tetap bisa sekolah/mengaji dan membayar honor guru mengaji dan MDA. Sampai ini sudah ada yang menghasilkan dan ada yang baru tanam. Tokoh masyarakat sampai saat ini juga berurusan sebesar Rp.5.000,-/bln. Pemotongan Honor Perangkat Nagari sebesar 2,5 %. Saat ini juga dikembangkan setiap warga yang menimbang buah sawit dan karet dikenakan pemotongan 2,5 % sesuai dengan Peraturan Nagari Sungai Limau Nomor : 05 Tanggal 08-06-2020 Jadi pengembangan dari inovasi ini selain dapat membayar uang sekolah/mengaji, membayar honor guru mengaji juga, memberikan pelatihan keterampilan, memberikan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan bantuan logistik bagi yang benar-benar tidak mampu.

◆ **Strategi Keberlanjutan**

SIUL SEDIKIT akan terus berkelanjutan karena mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial terutama masalah kemiskinan, anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, pengangguran (aspek sosial) dan tidak kalah pentingnya kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat, selain itu inovasi ini juga memberikan kesempatan kepada dunia usaha/pengusaha untuk berkontribusi dalam menunjang program pemerintah sehingga akan memperoleh pemerataan ekonomi (desa/nagari tanpa kesenjangan, tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Dari aspek lingkungan kegiatan ini sangat mendukung kearifan lokal daerah setempat : sifat kegotong-royongan dan kepedulian masih tinggi.

Bentuk dukungan Pemerintah dalam pengembangan inovasi ini adalah menetapkan bahwa pemanfaatan dana desa dan Pendapatan Asli Nagari (PAN) dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan khususnya pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan salah satu bentuk kegiatannya adalah SIUL SEDIKIT.

Langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan inovasi SIUL SEDIKIT ini adalah dengan senantiasa memberikan dukungan serta pencantuman kegiatan ini dalam DPA Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kedepan kegiatan SIUL SEDIKIT tidak hanya dikembangkan di Jorong Beringin Sakti Nagari Taratak Tinggi tapi merupakan kegiatan yang dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Sebelum SIUL SEDIKIT	Setelah SIUL SEDIKIT
Angka Anak putus sekolah per/tahun SD : 2 SMP : 5 SLTA : 17	Terjadi penurunan anak putus sekolah sebanyak 700b% SD : 2 SMP : 4 SLTA : 15
Angka Pengangguran 30 orang	Terjadi penurunan 500 % 5 org
Ibu Hamil dan Anak Balita mendapatkan bantuan tambahan gizi ... org	Terjadi peningkatan Ibu hamil dan anak balita yang mendapatkan bantuan tambahan gizi% 1 org
Lansia dan wanita rawan sosial ekonomi tidak mempunyai penghasilan	Memiliki penghasilan tambahan dari usaha ekonomi prduktif sebesar Rp.200.000; per bulan
Belum ada Keluarga yang diberikan bantuan logistik	Keluarga yang diberikan bantuan 4 KK

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2021.

Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. Laporan kinerja DINSOSP3APPKB ini disusun dengan mempedomani:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Yang merupakan gambaran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2021 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2021.

Disamping itu dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2021 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Adapun faktor-faktor utama penyebab keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Adanya integritas dan kerjasama yang solid dengan seluruh Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tupoksi yang diemban.
2. Terjalinnnya hubungan koordinasi yang harmonis dan sinergi antar instansi terkait dalam hal yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan kinerja yang telah ditetapkan.
3. Adanya bimbingan, dorongan dan saran-saran yang bersifat inovatif dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Dharmasraya guna mengemban Visi Kabupaten Dharmasraya **“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”** pada Tahun 2021 dan Misi yang dilandasi aspirasi masyarakat.

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan;
4. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara menyeluruh, efektif, dan efisien;

5. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/ Bagian/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 **dapat dipenuhi sesuai dengan harapan**. Terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target, kami menyadari semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas SOSP3APPKB

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**
Jabatan : Bupati Dharmasraya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINAS SOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat miskin	5,50%
		Persentase PMKS yang tertangani	95,00%
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	91,17%
		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100%
		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Pratama
3	Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan	Rasio KDRT	0,01%
		Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100%
		Rasio anak korban kekerasan yang tertangani	100%
4	Meningkatnya keterlibatan PUS dalam KB	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	84,68%
		Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need)	8,09%
5	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	100%
		Persentase kelompok tribina yang aktif	100%
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Hasil penilaian AKIP DINSOSP3APPKB oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.879.936.000,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 90.832.200,-	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 63.365.550,-	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 93.417.800,-	APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 540.967.000,-	APBD
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 708.215.200,-	APBD
7	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 75.286.550,-	APBD
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 67.072.400,-	APBD
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.631.989.000,-	APBD & DAK (APBN)

No	Program	Anggaran	Keterangan
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 75.353.250,-	APBD

Jumlah

Rp 9.226.434.950,-

Pulau Punjung,

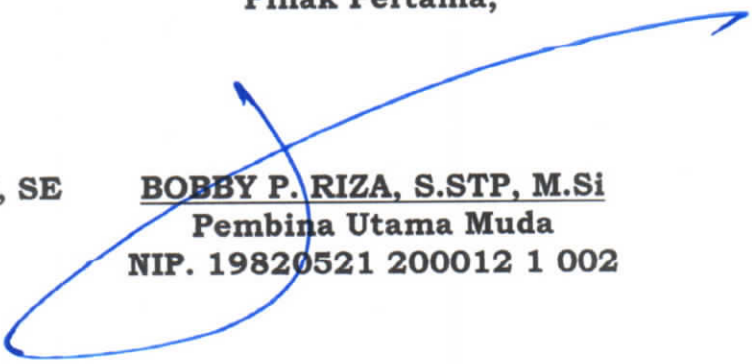
2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **NOVARINA, SKM**
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas SOSP3APPKB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002

Pihak Pertama,


NOVARINA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19720908 199203 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase Keluarga miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan fungsi sosialnya di masyarakat	75%
2	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase masyarakat di daerah terpencil/KAT yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	75%
3	Meningkatnya partisipasi PSKS di masyarakat	Persentase PSKS (Orsos, KT, Tagana, PSM, WKBSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pendamping) yang terampil dan Profesional	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 93.417.800,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 90.832.200,-	APBD
	Jumlah	Rp. 184.250.000,-	

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002

Pihak Pertama,


NOVARINA, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19720908 199203 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pcsanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **VERA SARI DEWI, SKM**
Jabatan : Kasi Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **NOVARINA, SKM**
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

NOVARINA SKM
Penata Tingkat I

NIP. 19720908 199203 2 005

Pihak Pertama,

VERA SARI DEWI, SKM
Penata Tingkat I

NIP. 19790527 200501 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KASI PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DINSOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersalurnya Bantuan Sosial Pangan	Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Rastra dan BPNT	8.609 KPM
2	Tersalurnya Bantuan Jaminan Kesehatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan JKN PBI Daerah	24.171 Jiwa

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
a.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 72.240.300,-	APBD
	Jumlah	Rp 72.240.300,-	APBD

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,


NOVARINA, SKM
Penata Tingkat I

NIP. 19720908 199203 2 005

Pihak Pertama,


VERA SARI DEWI, SKM
Penata Tingkat I

NIP. 19790527 200501 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **WELNI SUWANDI, SH**
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas SOSP3APPKB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Pertama

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002

Pihak Pertama,


WELNI SUWANDI, SH
Penata
NIP. 19840108 201001 2 027

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyediakan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan organisasi perempuan dalam pembangunan	100%
3	Meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kec, kenagarian, TESA, PISA)	100%
4	Meningkatnya akses masyarakat tentang informasi KDRT	Jumlah lembaga penanganan kasus KDRT di masyarakat	3 Lembaga
5	Meningkatnya kualitas penanganan perempuan korban kekerasan	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100%
6	Meningkatnya kualitas penanganan anak korban kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 708.215.200,-	APBD
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp 75.286.550,-	APBD
3	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp 67.072.400,-	APBD
	Jumlah	Rp 850.574.150,-	

Pulau Punjung.

2021

Pihak Pertama

Pihak Pertama,

BOBBY F. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002


WELNI SUWANDI, SH
Penata
NIP. 19840108 201001 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Hj. DWI ANDAYANI S.Sos**
Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas SOSP3APPKB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002


Hj. DWI ANDAYANI S.Sos
Pembina
NIP. 19701030 200212 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase anak terlantar dan anak yang berhadapan hukum yg terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	40%
		Persentase penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	100%
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	100%
2	Mengoptimalkan penanganan darurat bencana yang responsif dan dukungan logistik	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
3	Mengoptimalkan penanganan evakuasi dengan peralatan untuk penanggulangan bencana yang lebih baik	Mengoptimalkan penanganan evakuasi dengan peralatan untuk penanggulangan bencana yang lebih baik	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Rehabilitasi Sosial		
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 63.365.550,-	APBD
2	Program Penanganan Bencana		
a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 540.967.000	APBD
	Jumlah	Rp 604.332.550 ,-	

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002

Hj. DWI ANDAYANI S.Sos
Pembina
NIP. 19701030 200212 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sci. Darch Jorong Sci. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SISWANI, S.Sos**
Jabatan : Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **Hj. DWI ANDAYANI S.Sos**
Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Hj. DWI ANDAYANI S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19701030 200212 2 001

Pihak Pertama,

SISWANI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19710603 200212 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KASI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah anak terlantar dan anak berhadapan hukum yang terbantu	Jumlah anak terlantar yang terampil dan anak ABH yang terdampingi	9 anak Terlantar, 12 ABH
2	Terpenuhinya jaminan hidup penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Program Atensi Penyandang Disabilitas Berat	36 orang
3	Terpenuhinya jaminan hidup penyandang Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Program Atensi Lanjut Usia Terlantar	65 orang

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	a. Penyediaan Alat Bantu	Rp. 15.200.000,-	APBD
	b. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 5.000.000,-	APBD
	c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 43.165.550,-	APBD
	d. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 0,-	APBD
	Jumlah	Rp. 63.365.550,-	

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,



Hj. DWI ANDAYANI S.Sos
Pembina
NIP. 19701030 200212 2 001

Pihak Pertama,



SISWANI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19710603 200212 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DEFRIYANDI, S.Sos.I**
Jabatan : Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **Hj. DWI ANDAYANI S.Sos**
Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Hj. DWI ANDAYANI S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19701030 200212 2 001

Pihak Pertama,

DEFRIYANDI, S.Sos.I
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19801231 200902 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KASI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA PADA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat korban bencana	Jumlah Masyarakat yang dapat ditangani terhadap dampak bencana	639 KK/ 5.663 jiwa (Covid & dampak Covid) 1.908 jiwa (Alam) 183 jiwa (sosial)
2	Terwujudnya proses evakuasi	Jumlah sarana dan prasarana untuk kesiapsiagaan bencana	3 Unit

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penanganan Bencana		
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 540,967,000,-	APBD
	Jumlah	Rp. 540,967,000,-	

Pulau Punjung, 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Hj. DWI ANDAYANI S.Sos
Pembina
NIP. 19701030 200212 2 001



DEFRIYANDI, S.Sos.I
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19801231 200902 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SRI LESTARI, SE**
Jabatan : Kasi Jaminan sosial Keluarga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **Hj. DWI ANDAYANI S.Sos**
Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Hj. DWI ANDAYANI S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19701030 200212 2 001

Pihak Pertama,

SRI LESTARI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19760723 200604 2 027

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KASI JAMINAN SOSIAL KELUARGA PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DINSOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersalurnya Bantuan Jaminan Kesehatan	Jumlah KPM yang terfasilitasi mendapatkan bantuan PKH	5.208 KPM

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21.177.500,-	APBD
	Jumlah	Rp 21.177.500,-	APBD

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,



Hj. DWI ANDAYANI S.Sos
Pembina
NIP. 19701030 200212 2 001

Pihak Pertama,



SRI LESTARI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19760723 200604 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M**
Jabatan : Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas SOSP3APPKB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19820521 200012 1 002

YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M
Pembina
NIP. 19700611 199012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kepesertaan KB Aktif di Masyarakat	Jumlah Peserta Akseptor KB Aktif	36.894 PUS
2	Meningkatnya pengetahuan, informasi serta kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menggunakan alat kontrasepsi	Jumlah orang sosialisasi alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	44.572Orang
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR Mandiri	Persentase anggota UPPKS KB aktif	95%
4	Meningkatnya pengembangan bahan informasi, tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase BKB, BKR, BKL yang aktif	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.631.989.000,-	APBD & DAK (APBN)
2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 75.353.250,-	APBD
	Jumlah	Rp 3.707.342.250,-	

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002

YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M
Pembina
NIP. 19700611 199012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **FEBRIYATNI**
Jabatan : Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M**
Jabatan : Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M

Pembina

NIP. 19700611 199012 2 001

FEBRIYATNI

Penata Tingkat I

NIP. 19680226 198803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KASI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi	Jumlah kelompok UPPKS yang diberi modal	6 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase kader Tribina (BKB, BKR, BKL) yang aktif	100%
		Jumlah peserta pembinaan/ sosialisasi Tribina (BKB, BKR, BKL)	2.450 Orang

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		
a.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 75.353.250,-	APBD
	Jumlah	Rp. 75.353.250,-	

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M
Pembina
NIP. 19700611 199012 2 001


FEBRIYATNI
Penata Tingkat I
NIP. 19680226 198803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **NILAM ALJASWAN, SKM**
Jabatan : Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M**
Jabatan : Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M
Pembina
NIP. 19700611 199012 2 001

NILAM ALJASWAN, SKM
Penata
NIP. 19750428 200012 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KASI PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan KB	Persentase pelayanan oleh Kader KB (PLKB, PPKBD/ Sub. PPKBD)	100%
		Jumlah kampung KB di Kabupaten	28 Kampung KB
		Jumlah Balai Penyuluhan KB	11 Balai Penyuluhan KB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		
	a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rp 2.476.047.000,-	APBD
	Jumlah	Rp 2.476.047.000,-	

Pulau Punjung, 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

YUSNI SRI HARTATI, S.Tr.Keb, M.K.M
Pembina
NIP. 19700611 199012 2 001

NILAM ALJASWAN, SKM
Penata
NIP. 19750428 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASTRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **LASMITA, SKM, M.Kes**
Jabatan : Sekretaris Dinas SOSP3APPKB

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas SOSP3APPKB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820521 200012 1 002

Pihak Pertama,

LASMITA, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19680212 198812 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
 SEKRETARIS PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
 ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DINSOSP3APPKB	100%
		Persentase peningkatan administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DINSOSP3APPKB	100%
		Persentase pencapaian program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DINSOSP3APPKB	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.879.936.000,-	APBD
	Jumlah	Rp 3.879.936.000,-	

Pulau Punjung, 2021

Pihak Kedua,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19820521 200012 1 002

Pihak Pertama,

LASMITA, SKM, M.Kes
 Pembina
 NIP. 19680212 198812 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SELY TRI MARNI, SE**
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **LASMITA, SKM, M.Kes**
Jabatan : Sekretaris Dinas SOSP3APPKB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

LASMITA, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19680212 198812 2 001

Pihak Pertama,

SELY TRI MARNI, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19860710 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DINSOSP3APPKB)


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola manajemen administrasi umum dan kepegawaian	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		APBD
	a. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 220.593.000,-	
	b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.000.000,-	
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.058.622.000,-	
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 152.470.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.440.685.000,-	

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,



LASMITA, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19680212 198812 2 001

Pihak Pertama,



SELY TRI MARNI, SE
Penata Muda Tk.I
NIP. 19860710 200902 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat Jl. Pesanggerahan Sei. Dareh Jorong Sei. Kilangan, Telp/ Fak. (0754)-451426
Website: dinsos@dharmasrayakab.go.id E-mail: dinsosp3appkbdharmasraya@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **DWI AMELIA NURHIDAYAH, S.Sos**
Jabatan : Kasubag Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **LASMITA, SKM, M.Kes**
Jabatan : Sekretaris Dinas SOSP3APPKB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Punjung,

2021

Pihak Kedua,

LASMITA, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19680212 198812 2 001

Pihak Pertama,

DWI AMELIA NURHIDAYAH, S.Sos
Penata Muda Tk.I
NIP. 19870707 201503 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KASUBAG KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINSOSP3APPKB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan	Persentase penatatausahaan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%
		Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		APBD
	a. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.439.251.000,-	
	Jumlah	Rp. 2.439.251.000,-	

Pulau Punjung, 2021

Pihak Kedua,



LASMITA, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19680212 198812 2 001

Pihak Pertama,



DWI AMELIA NURHIDAYAH, S.Sos
Penata Muda Tk.I
NIP. 19870707 201503 2 002

PENGUKURAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APPKB)
KAB. DHARMASRAYA, TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				PROGRAM DAN KEGIATAN	DPPA	ANGGARAN		%	KET
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN			REALISASI			
1	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat Miskin	%	5,50	6,67	121,27	Program Pemberdayaan Sosial (Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	99,77		
							Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	99,96		
							Program Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial)	Rp	Rp	99,80		
							Program Penanganan Bencana (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	99,95		
							Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Pelembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	97,15		
2	Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak	Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	%	91,17	100	109,69	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	97,16		
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHAA) (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Penghantaran Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	98,81		
							Program Perlindungan Perempuan (Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	99,27		
3	Berturangnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan	Rasio KDRT	%	0,01	0,002	100,00	Program Perlindungan Perempuan (Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	99,27		
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal)	Rp	Rp	98,96		
4	Meningkatnya keterlibatan PUS dalam KB	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	84,64	83,43	98,57%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota)	Rp	Rp	98,70		
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (Pelaksanaan Peningkatan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	Rp	Rp	99,84		
5	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok Usaha Penjualan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	%	100	100,00	100,00	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (Pelaksanaan Peningkatan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga)	Rp	Rp	99,84		
							Persentase kelompok trtbina yang aktif	100	100,00	100,00		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		KET
			SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN		DPPA	REALISASI	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian AKIP DINOSPP3APPKB oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Rp 3.879.936.000	Rp 3.780.510.753	97,44 %

Pulau Punjung,

2022

KEPALA DINAS,

BOBBY RIZA, STP, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 119820521 200012 1 002







Piagam Penghargaan

NOMOR : 002.6/IV.1/Org/2021
BUPATI DHARMASRAYA

DENGAN INI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEKERJAAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Atas Prestasinya Sebagai
JUARA I

AGENT OF CHANGE

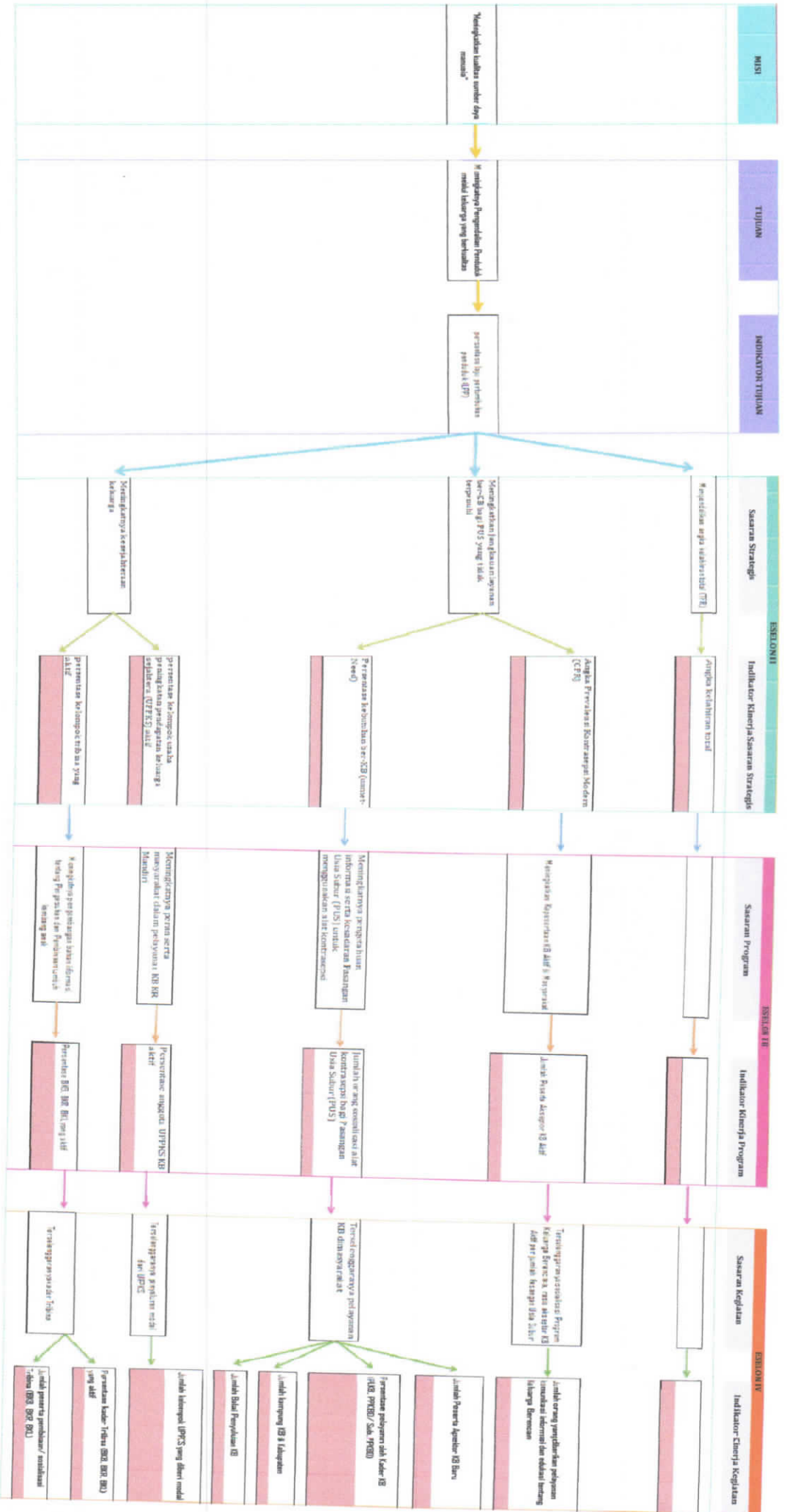
DALAM RANGKA PELAKSANAAN LUMBA BULAN RI TINGRAT KASABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

PULAU PIRLUNG, NOVEMBER 2021
BUPATI DHARMASRAYA



SUTARN RISKI TUANKU KERAJAAN, SE

POHON KINERJA DINSOS3APPKB TAHUN ANGGARAN 2021-2026
 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KAB. DHARMASRAYA



Monitoring Pencapaian Kinerja OPD Triwulan I dan II
 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Kinerja Sasaran				Realisasi	Realisasi	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
				TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II		
1	Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat	Persentase masyarakat miskin persentase PMKS yang teranganj	5,50%	3%	3,50%	4,50%	5,50%	3%	3,50%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	115.992.150	31.892.950	64.184.450	Tidak ada permasalahan	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur
			95,00%	20%	50%	80%	100%	20%	50%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	51.781.500	19.304.500	31.608.500	Tidak ada permasalahan	Dilaksanakan sesuai dengan prosedur
2	Meningkatnya kecermatan gender dan terpenuhinya hak anak	persentase keaktifan FocusPoint perempuan daerah	91,17%	90,00%				90,00%	90,00%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	202.967.500	86.062.000	134.778.250	Kasus covid-19 meningkatkan penyediaan permukiman bagi korban juga akan	Mengajukan perubahan anggaran kepada APBD
											PROGRAM PENANGANAN BENCANA	711.818.500	50.884.750	111.513.566	tidak semua anggota FocusPoint paham dengan penyusunan GAB & GBS meski sudah dilakukan pelatihan, hal ini disebabkan karena pensilil FocusPoint dibarengi OPD diganti terena ada mutasi
3	Berkurangnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan	Kehidupan/Kom Layak Anak (KLA)	Patama	-	Madan	-	-	-	Madya	PROGRAM PENEMUNAN HAK ANAK	40.076.000	26.945.000	34.426.150	Tidak ada permasalahan	Sesuai dengan perencanaan kegiatan
			0,01%	0,002%	0,002%	0,003%	0,001%	0,002%	0,002%	0,002%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	47.784.000	14.951.150	33.320.200	
4	Meningkatnya kerentanan PIS dalam KB	Rasio perempuan korban kekerasan yang teranganj	100%	30%	50%	75%	100%	30%	50%						
			100%	30%	50%	75%	100%	30%	50%						
5	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Rasio anak korban kekerasan yang teranganj	84,68%	81,79%	82,20%	82,45%	84,68%	81,79%	82,20%	PROGRAM PEMINATAN KELUARGA BERENCANA (KPB)	3.631.989.000	383.097.350	951.715.800		
			84,68%	81,79%	82,20%	82,45%	84,68%	81,79%	82,20%	81,79%	9,3%	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEHAT/TRA (KS)	40.000.100	18.884.250	27.239.400
6	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah daerah	Angka kelahiran ber-KT tidak teranganj (Umur head)	80,9%	9,3%	9,3%	9,3%	80,9%	9,3%	9,3%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.679.814.900	826.783.576	2.127.467.453		
			100%	30%	50%	60%	100%	30%	50%						
Jumlah											9.579.639.000	1.485.302.426	3.566.249.019		

Pulau Panjang Juli 2021
 KEPALA DINASSP3A PPKB.
ROBBY P. RITA, S.STP, M.Si
 Penjabat Utama Muda, IV/c
 NIP. 19820521 20012 1 004

